



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I TAHUN 2024

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) Perikanan Budi Daya Triwulan I Tahun 2024 dapat terselesaikan.

LKj Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan I Tahun 2024 ini merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan atas pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif dengan menggunakan indikator kinerja sebagai alat ukurnya.

Kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan LKj ini, dengan harapan kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya dalam mendukung pelaksanaan kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya untuk meningkatkan pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan di masa mendatang semakin meningkat, disamping dapat memberikan informasi dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta sebagai evaluasi kinerja untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Jakarta, April 2024

Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
LAMPIRAN	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Maksud dan Tujuan.....	4
1.3. Tugas dan Fungsi.....	4
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)	5
1.5. Kendala dan Permasalahan	9
1.6. Sistematika Penyajian Laporan.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Budidaya Tahun 2020 - 2024	10
2.2. Sasaran Strategis	11
2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024	11
2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN.....	15
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	15
3.2. Analisis Capaian Kinerja	18
SK.01 Tatakelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya	18
IKSK.1 Nilai PM SAKIP Sekretariat DJPB	18
IKSK.2 Persentase Pelaku Usaha budidaya ikan yang Terintegrasi KUSUKA	19
IKSK.3 Persentase Data Produksi Perikanan Budidaya yang Tervalidasi	21
IKSK.4 Persentase Realisasi Data Informasi Geospasial Termatik (IGT) Lahan Pembudidayaan ikan yang Terintegrasi	22

IKSK.5	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen Perikanan Budi Daya.....	23
IKSK.6	Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya	25
IKSK.7	Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB.....	27
IKSK.8	Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP.....	30
IKSK.9	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Budidaya	32
IKSK.10	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani.....	34
IKSK.11	Unit Kerja Sesditjen Perikanan Budi Daya yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	35
IKSK.12	Persentase Dokumen KerjaSama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budi Daya	36
IKSK.13	Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya	38
IKSK.14	Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ditjen Perikanan Budi Daya dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024	41
IKSK.15	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya	42
IKSK.16	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen Perikanan Budi Daya	43
IKSK.17	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya.....	45
IKSK.18	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya	47
IKSK.19	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya	48
IKSK.20	Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen Perikanan Budi Daya	49
IKSK.21	Persentase Layanan Perkantoran Setditjen Perikanan Budi Daya	50
IKSK.22	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPB	51
IKSK.23	Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang Melaksanakan PEKPPP Mandiri	52
3.3.	Akuntabilitas Keuangan.....	54

BAB IV PENUTUP 56

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024.....	15
Tabel 2. Capaian Nilai PM SAKIP Sekretariat DJPB	19
Tabel 3. Capaian Persentase Pelaku Usaha budidaya ikan yang Terintegrasi KUSUKA.....	20
Tabel 4. Capaian Persentase Data Produksi Perikanan Budidaya yang Tervalidasi	21
Tabel 5. Capaian Persentase Realisasi Data Informasi Geospasial Termatik (IGT) Lahan Pembudidayaan ikan yang Terintegrasi	23
Tabel 6. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen PB	24
Tabel 7. Capaian Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budidaya	26
Tabel 8. Capaian Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB	28
Tabel 9. Capaian Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP	31
Tabel 10. Capaian Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Budidaya.....	33
Tabel 11. Capaian Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani	34
Tabel 12. Capaian Unit kerja Setditjen PB yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar	36
Tabel 13. Capaian Persentase Dokumen Kerja Sama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budidaya	37
Tabel 14. Capaian Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya.....	39
Tabel 15. Capaian Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ditjen PB dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen PB Tahun 2024	42
Tabel 16. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya	43
Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen Perikanan Budi Daya	44
Tabel 18. Capaian Tingkat Kepatuhan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya.....	46
Tabel 19. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya.....	47

Tabel 20. Capaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya.....	48
Tabel 21. Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen Perikanan Budi Daya	50
Tabel 22. Capaian Persentase Layanan perkantoran Setditjen Perikanan Budi Daya.....	51
Tabel 23. Capaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPB .	52
Tabel 24. Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang Melaksanakan PEKPPP Mandiri .	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keragaan SDM Setditjen Perikanan Budi Daya.....	5
Gambar 2. Persentase Jumlah Pegawai Setditjen Perikanan Budi Daya Berdasarkan Pangkat/Golongan	6
Gambar 3. Keragaan Pejabat Fungsional Tertentu	7
Gambar 4. Keragaan Pejabat Fungsional Umum	8
Gambar 5. Persentase Jumlah Pegawai Setditjen Perikanan Budi Daya Berdasarkan Jenjang Pendidikan	8
Gambar 6. Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budidaya 2020-2024	10
Gambar 7. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budidaya 2020-2024.....	11
Gambar 8. Perjanjian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024.....	12
Gambar 9. Dashboard Capaian Kinerja Setditjen PB	14
Gambar 10. Serapan Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024.....	54
Gambar 11. Serapan Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2023.....	55

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
2. Dokumentasi Rapat Koordinasi Evaluasi DAK 2023, Rencana Pelaksanaan DAK 2024 dan Sosialisasi Pendataan Perikanan Budi Daya Tahun 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) Perikanan Budi Daya Triwulan I Tahun 2024 merupakan laporan capaian kinerja atas target yang telah dicapai dalam kurun waktu Januari sampai Maret Tahun 2023 dan juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban Setditjen Perikanan Budi Daya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama triwulan I tahun 2024. Mengacu pada Rancangan Teknokratis Rencana Strategis (Renstra) Perikanan Budidaya Tahun 2020- 2024 maupun Perjanjian Kinerja (PK) Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2023, maka Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) Perikanan Budi Daya Triwulan I Tahun 2024 ini memuat rencana kinerja beserta target yang ingin dicapai serta pengukuran pencapaian sasaran termasuk keberhasilan dan kendala pelaksanaan kegiatan di lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya selama periode triwulan I tahun 2024.

PK Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024 berisi 1 (satu) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana penjelasan berikut:

1. Sasaran Strategis (SK.01): Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, yaitu:

- 1) **IKSK.1** Nilai PM SAKIP Sedditjen Perikanan Budi Daya, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 80,5 (Nilai);
- 2) **IKSK.2** Persentase Pelaku Usaha budidaya ikan yang Terintegrasi KUSUKA, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 80 (Persen), dengan capaian pada triwulan I sebesar 120% (prosentase maksimal pada kinerjanya);
- 3) **IKSK.3** Persentase Data Produksi Perikanan Budidaya yang Tervalidasi, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 80 (Persen);
- 4) **IKSK.4** Persentase Realisasi Data Informasi Geospasial Termatik (IGT) Lahan Pembudidayaan ikan yang Terintegrasi, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 100 (Persen);
- 5) **IKSK.5** Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen Perikanan Budi Daya, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 85 (Indeks);
- 6) **IKSK.6** Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 75 (Indeks);
- 7) **IKSK.7** Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 3 (Persen);
- 8) **IKSK.8** Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilaian Internal KKP, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 76 (Unit);
- 9) **IKSK.9** Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Budidaya, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 100 (Persen);

- 10) **IKSK.10** Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 65 (Persen);
- 11) **IKSK.11** Unit Kerja Setditjen Perikanan Budi Daya yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 94 (Persen), dengan capaian pada triwulan I sebesar 120%;
- 12) **IKSK.12** Persentase Dokumen Kerjasama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budi Daya, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 90 (Persen), dengan capaian pada triwulan I sebesar 120%;;
- 13) **IKSK.13** Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 86 (Persen), dengan capaian pada triwulan I sebesar 116,28%;
- 14) **IKSK.14** Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 100 (Persen);
- 15) **IKSK.15** Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 80 (Persen), dengan capaian pada triwulan I sebesar 120%;;
- 16) **IKSK.16** Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen Perikanan Budi Daya, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 93,76 (Nilai);
- 17) **IKSK.17** Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 80 (Persen);
- 18) **IKSK.18** Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 86 (Nilai);
- 19) **IKSK.19** Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 80 (Persen);
- 20) **IKSK.20** Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen Perikanan Budi Daya, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 80 (Persen);
- 21) **IKSK.21** Persentase Layanan Perkantoran Setditjen Perikanan Budi Daya, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 80 (Persen);
- 22) **IKSK.22** Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggara SPIP Unit DJPB, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 3,3 (Nilai); dan
- 23) **IKSK.23** Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang Melaksanakan PEKPPP Mandiri, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 75 (Persen).

Perbaikan atas ketercapaian kinerja yang ditetapkan pada triwulan berikutnya adalah sebagaimana berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM yang melaksanakan dan mengimplementasikan SAKIP di lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya;
- 2) Menyusun sasaran kerja pegawai Tahun 2024 dan melakukan evaluasi kinerja periode Triwulan I Tahun 2024;

- 3) Membuat monitoring perkembangan tugas belajar;
- 4) Membuat rekapitulasi kehadiran triwulan I;
- 5) Berkoordinasi dengan Biro SDM Aparatur dan Organisasi terkait perubahan nomenklatur jabatan fungsional Pengawas Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan dan proses administrasi dan penetapan kebutuhan jabatan fungsional bidang perikanan budidaya;
- 6) meningkatkan koordinasi dengan unit kerja yang telah diusulkan untuk mengikuti penilaian TPI/TPN tahun 2024 untuk *mengupdate* dokumen/data dukung pelaksanaan pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM dan menindaklanjuti temuan hasil evaluasi APIP (Itjen KKP/BPK RI) agar unit kerja yang telah diusulkan dapat memperoleh nilai yang optimal pada saat dinilai oleh Tim Penilai Internal (TPI) KKP;
- 7) Meningkatkan peran aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan probity audit dan rewiuw atas pengadaan barang dan jasa mulai dari perencanaan hingga pembayaran;
- 8) Melakukan revisi halaman III dipa dan Meningkatkan penyerapan anggaran sesuai target yang di halaman III dipa;
- 9) Melakukan pengamanan BMN dari aspek administrasi, pencatatan, dan hukum, Mendorong usulan penetapan status penggunaan (PSP) BMN satker Sekretariat untuk ditetapkan PSP nya oleh Kementerian Keuangan, Mendorong percepatan penghapusan BMN rusak berat pada satker Sekretariat DJPB, Melakukan update data aplikasi Siman terhadap PSP yang sudah terbit SK, Melakukan revisi RKBMN pada tahun anggaran berjalan lingkup Sekretariat, Melakukan inventarisasi BMN, Memproses usulan hibah BMN kepada Pengguna Barang/pengelola Barang; dan
- 10) Melakukan koordinasi dengan Unit Pelayanan Publik (UPP) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya untuk malakukan PEKPPP Mandiri tahun 2024 dan *mengupload* dokumen data dukung maksimal tanggal 30 November 2024.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka memenuhi prinsip akuntabilitas sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja yaitu: (i) untuk menyajikan pertanggungjawaban dan informasi mengenai rencana dan capaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Setditjen Perikanan Budi Daya dan (ii) sebagai bahan evaluasi atas keberhasilan maupun kegagalan serta permasalahan yang terkait dengan kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya sehingga dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan mengambil langkah-langkah perbaikan.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Setditjen Perikanan Budi Daya mempunyai kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut:

1. Kedudukan

Setditjen Perikanan Budi Daya merupakan salah satu unit kerja Eselon II yang dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya.

2. Tugas

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan direktorat jenderal.

3. Fungsi

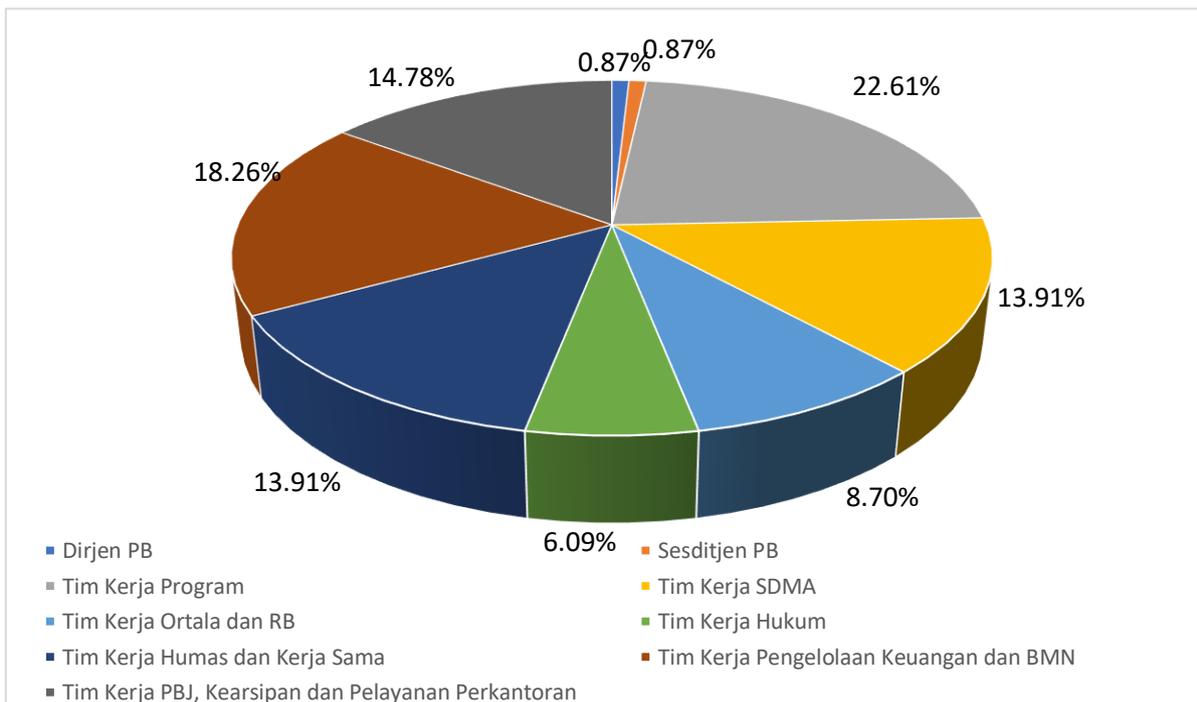
Setditjen Perikanan Budi Daya menyelenggarakan fungsi:

- 1) koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan kinerja, penyiapan bahan pimpinan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- 2) koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;

- 3) koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- 4) koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
- 5) koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, dan ketatausahaan.

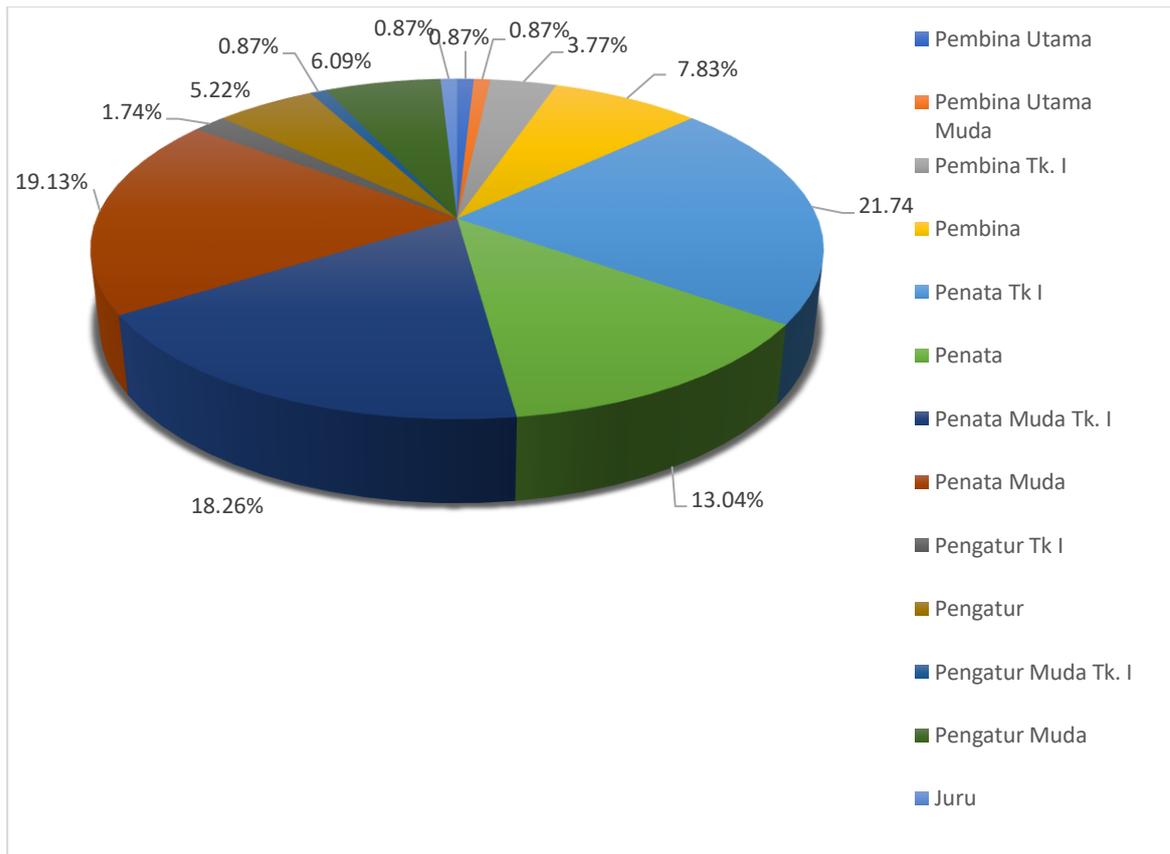
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pegawai pada Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024 berjumlah 115 orang, terdiri dari Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya (Dirjen PB), Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Sesditjen PB) dan 113 orang pegawai tersebar pada 7 Tim Kerja lainnya, yaitu: (i) Tim Kerja Program berjumlah 26 orang; (ii) Tim Kerja SDMA berjumlah 16 orang; (iii) Tim Kerja Ortala dan RB berjumlah 10 orang; (iv) Tim Kerja Hukum berjumlah 7 orang; (v) Tim Kerja Humas dan Kerja Sama berjumlah 16 orang; (vi) Tim Kerja Pengelolaan Keuangan dan BMN berjumlah 21 orang, dan (vii) Tim Kerja PBJ, Kearsipan dan Pelayanan Perkantoran berjumlah 17 orang.



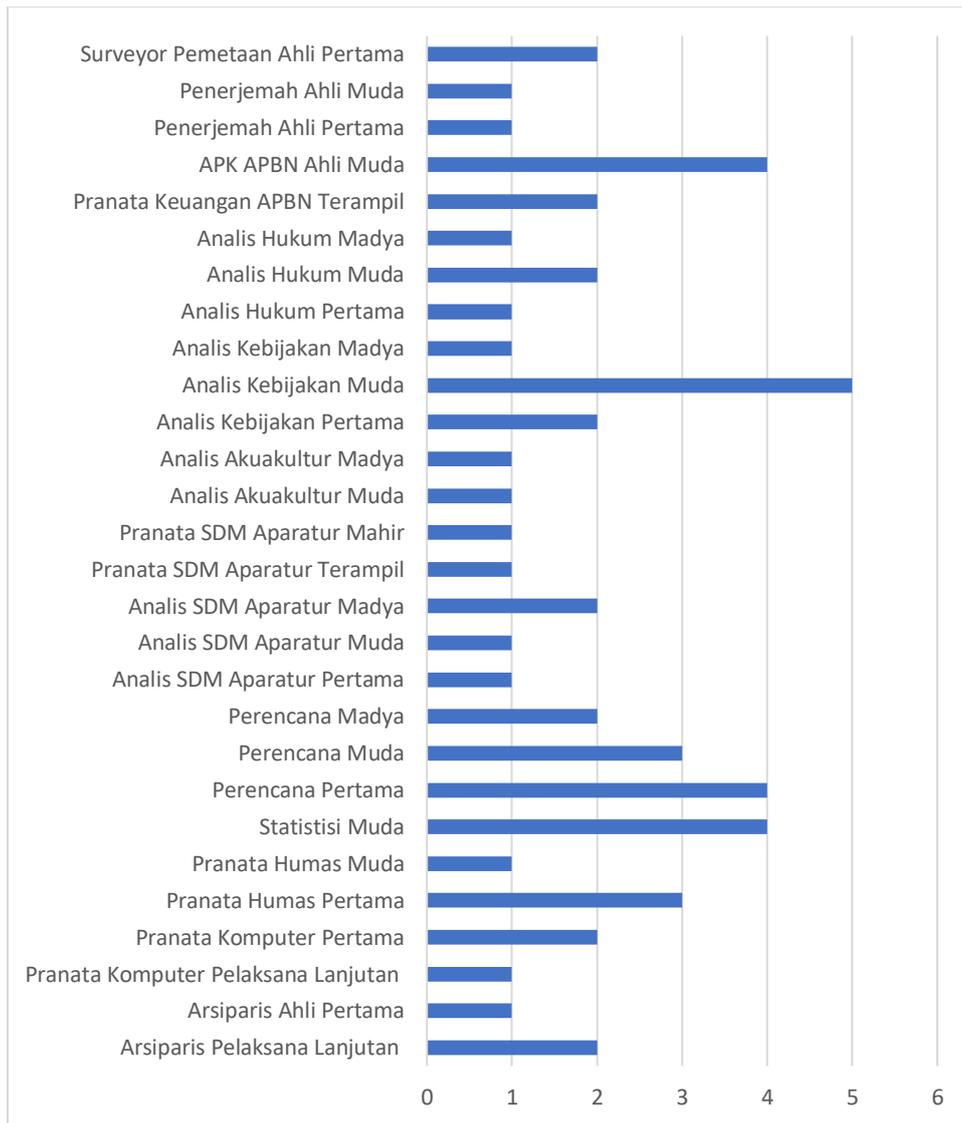
Gambar 1. Keragaan SDM Setditjen Perikanan Budi Baya

Berdasarkan pangkat/golongan ruang, pegawai pada Setditjen Perikanan Budi Daya terdiri dari: (i) Pembina Utama berjumlah 1 orang; (ii) Pembina Muda berjumlah 1 orang; (iii) Pembina Tk.1 berjumlah 4 orang; (iv) Pembina berjumlah 9 orang; (v) Penata Tk.1 berjumlah 25 orang; (vi) Penata berjumlah 15 orang; (vii) Penata Muda Tk.1 berjumlah 21 orang; (viii) Penata Muda berjumlah 22 orang; (ix) Pengatur Tk.1 berjumlah 2 orang; (x)



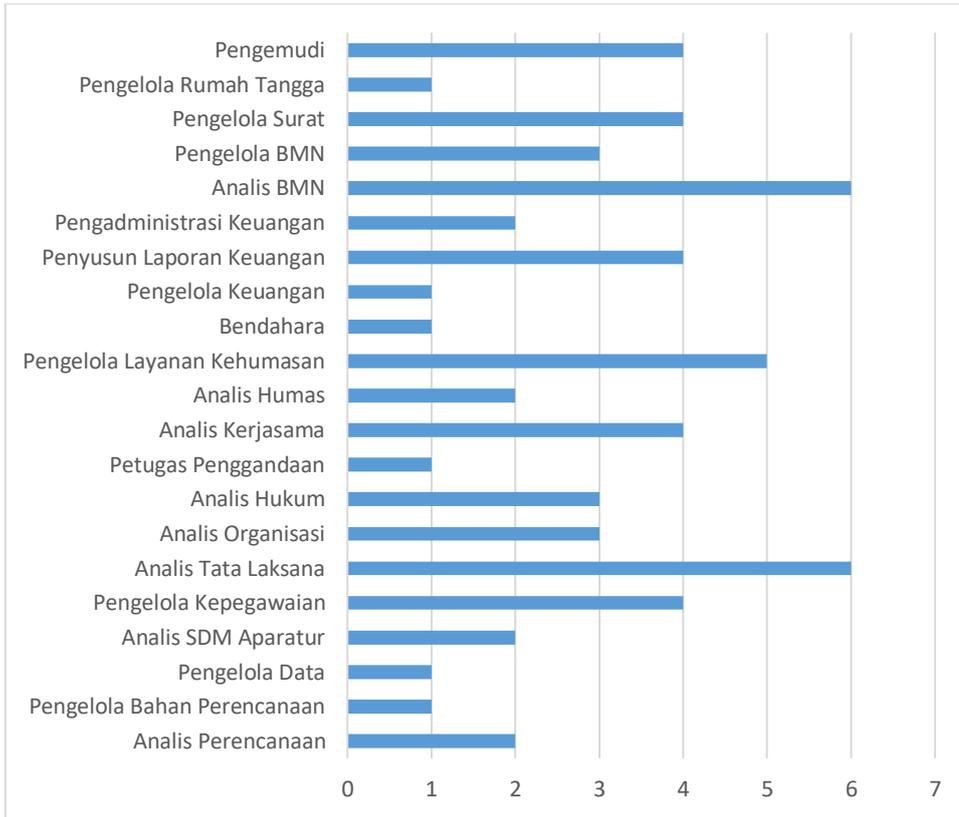
Gambar 2. Persentase Jumlah Pegawai Setditjen Perikanan Budi Daya Berdasarkan Pangkat/Golongan

Sedangkan pejabat fungsional tertentu pada Setditjen Perikanan Budidaya berjumlah 50 orang yang terdiri dari Arsiparis Pelaksana Lanjutan, Asiparis Ahli Pertama, Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan, Pranata Komputer Ahli Pertama, Pranata Humas Ahli Pertama, Pranata Humas Ahli Muda, Statistisi Ahli Muda, Perencana Ahli Pertama, Perencana Ahli Muda, Perencana Ahli Madya, Analis SDM Aparatur Ahli Pertama, Analis SDM Aparatur Ahli Muda, Analis SDM Aparatur Ahli Madya, Pranata SDM Aparatur Terampil, Pranata SDM Aparatur Mahir, Analis Akuakultur Ahli Muda, Analis Akuakultur Ahli Madya, Analis Kebijakan Ahli Pertama, Analis Kebijakan Ahli Muda, Analis Kebijakan Ahli Madya, Analis Hukum Ahli Pertama, Analis Hukum Ahli Muda, Analis Hukum Ahli Madya, Pranata Keuangan APBN, APK APBN Pertama, APK APBN Muda, Penerjemah Ahli Pertama, Penerjemah Ahli Muda, Surveyor Pemetaan Ahli Pertama.



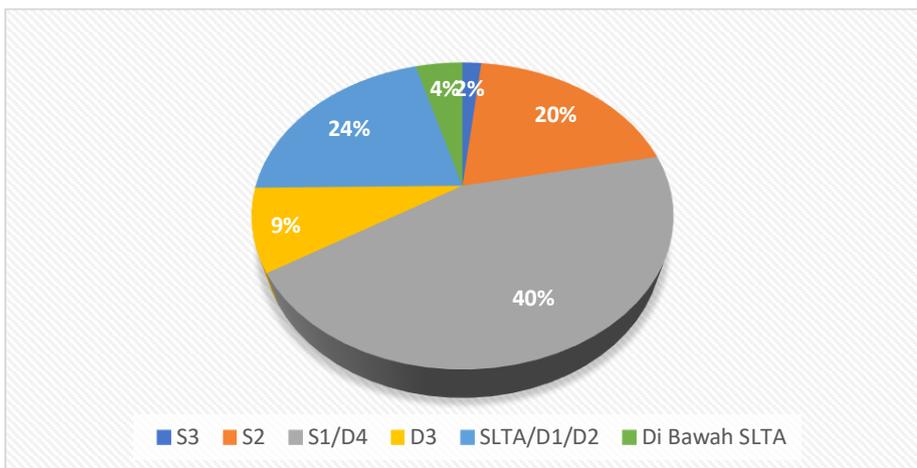
Gambar 3. Keragaan Pejabat Fungsional Tertentu

Pejabat Fungsional Umum pada Setditjen Perikanan Budidaya berjumlah 60 orang, terdiri dari Analisis Perencanaan, Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pengelola Bahan Perencanaan, Pengelola Data, Analisis SDM Aparatur, Pengelola Kepegawaian, Analisis Tata laksana, Analisis Organisasi, Analisis Hukum, Petugas Penggandaan, Analisis Kerjasama, Analisis Humas, Pengelola Layanan Kehumasan, Bendahara, Pengelola Keuangan, Pengadministrasi Keuangan, Analisis BMN, Pengelola BMN, Pengelola Surat, Pengelola Rumah Tangga, dan Pengemudi.



Gambar 4. Keragaan Pejabat Fungsional Umum

Sementara itu pengelompokan menurut jenjang pendidikannya, pegawai pada Setditjen Perikanan Budidaya terdiri dari: (i) Lulusan S-3 berjumlah 2 orang; (ii) Lulusan S-2 berjumlah 23 orang; (iii) Lulusan S-1/D-4 berjumlah 51 orang; (iv) Lulusan D-3 berjumlah 10 orang; (v) Lulusan D-2/D-1/SLTA berjumlah 24 orang; dan (vi) Lulusan di bawah SLTA sebanyak 5 orang.



Gambar 5. Persentase Jumlah Pegawai Setditjen Perikanan Budi Daya Berdasarkan Jenjang Pendidikan

1.5. Kendala dan Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi adalah:

1. Dalam hal sumber daya manusia di lingkup perikanan budidaya, yang secara umum meliputi perubahan struktur organisasi yang dinamis dan kreativitas sumberdaya manusia untuk pengembangan organisasi masih rendah.
2. Perlunya sosialisasi dan/atau bimbingan kembali tentang pengukuran kinerja kepada seluruh pegawai.
3. Belum tersosialisasikannya pedoman terbaru terkait standar kompetensi jabatan fungsional dan penilaian kompetensi yang menyebabkan diferensiasi pemahaman peserta uji kompetensi.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan

LKj Tahunan Setditjen Perikanan Budi Daya ini menyajikan capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya tahun 2024, yang diketahui dari realisasi capaian target indikator kinerja masing-masing sasaran strategis. Dari hasil analisis capaian kinerja terhadap perencanaan kinerja yang sudah ditetapkan, maka akan dapat diketahui permasalahan yang ada dan tindak lanjutnya demi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematika penyajian LKj Tahunan Setditjen Perikanan Budi Daya tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Bab I, Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Tugas dan Fungsi, Keragaan SDM, Kendala dan Permasalahan serta Sistematika Penyajian Laporan.
2. **Bab II, Perencanaan Kinerja**, menguraikan tentang Rencana Strategis, Sasaran Strategis, PK Setditjen Perikanan Budi Daya dan Pengukuran Capaian Kinerja.
3. **Bab III, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, menyajikan capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya untuk setiap SK sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk pencapaian tersebut serta akuntabilitas keuangan.
4. **Bab IV, Penutup**, menjelaskan kesimpulan atas capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya serta perbaikan yang akan dilakukan terhadap permasalahan yang ada guna meningkatkan kinerja di masa mendatang.
5. **Lampiran**, menyajikan dokumen pendukung laporan kinerja yang diperlukan sebagai penjelasan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Budidaya Tahun 2020-2024

Berdasarkan Rancangan Teknokratis Renstra Perikanan Budidaya 2020-2024, Ditjen Perikanan Budidaya melaksanakan program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya yang Berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Fokus kebijakan bertumpu pada 4 aspek, yaitu: (i) teknologi produksi, melalui inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai produksi dan nilai tambah; (ii) sosial ekonomi, melalui keterlibatan semua stakeholder dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha; (iii) keberlanjutan lingkungan, melalui aktivitas perikanan budidaya ramah lingkungan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan; (iv) berorientasi pasar, artinya perikanan budidaya memproduksi komoditas unggulan yang berorientasi pada permintaan pasar. Pada akhirnya, pembangunan perikanan budidaya diharapkan dapat berperan penting untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, memenuhi ketahanan pangan nasional, dan peningkatan ekspor produk.



Gambar 6. Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budidaya 2020-2024

Kebijakan pembangunan perikanan budidaya dikelompokkan menjadi tiga kelompok strategi yang meliputi Pengelolaan Kawasan Berkelanjutan, Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, dan Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan. Kelompok strategi tersebut kemudian masing-masing dijabarkan dalam strategi, sebagaimana disajikan pada Gambar 7.



Gambar 7. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budidaya 2020-2024

2.2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sebagai suatu *outcome/ impact* dari program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tahun 2020-2024 adalah Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya, Setditjen Perikanan Budi Daya telah melakukan beberapa langkah strategis, yaitu: (i) Penetapan SS dan IKK Setditjen Perikanan Budi Daya tahun 2024 sebagai upaya untuk memantapkan arah kebijakan pada Setditjen Perikanan Budi Daya selama satu tahun, yang dapat diukur atas tingkat ketercapaian kinerja; (ii) PK Setditjen Perikanan Budi Daya tahun 2024; dan (iii) Penyusunan rencana aksi dan evaluasi rencana aksi tahun 2024.

2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi/satuan kerja. Tujuan perjanjian kinerja adalah untuk: (i) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (ii) Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya; (iii) Alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah; (iv) Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan (v) Dasar pemberian penghargaan (*reward*)/sanksi (*punishment*).

Adapun Perjanjian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Gemi Triastutik**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perikanan Budi Daya

Gemi Triastutik

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	1. Nilai PM SAKIP Setditjen PB (Persen)	84
	2. Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang terintegrasi KUSUKA (Persen)	80
	3. Persentase Data Produksi Perikanan Budi Daya yang Tervalidasi (Persen)	80
	4. Persentase Data Realisasi Informasi Geospasial Tematik (IGT) Lahan Pembudidayaan Ikan yang Terintegrasi (Persen)	100
	5. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen Perikanan Budidaya (Indeks)	85
	6. Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya (Nilai)	75
	7. Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB (Level)	3
	8. Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP (Nilai)	76
	9. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Budi Daya (Persen)	100
	10. Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani (Persen)	65
	11. Unit Kerja Setditjen PB yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (Persen)	94

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	12. Persentase Dokumen Kerjasama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budi Daya (Persen)	90
	13. Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya (Persen)	>86
	14. Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024 (Persen)	100
	15. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	80
	16. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	93,76
	17. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya	80
	18. Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	86
	19. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	80
	20. Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	80
	21. Persentase Layanan Perkantoran Setditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	80

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	22. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPB (Nilai)	3,3
	23. Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang Melaksanakan PEKPPP Mandiri (Persen)	75

Jakarta, Januari 2024

<p>Pihak Kedua Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya</p>  <p>Tb. Haeru Rahayu</p>	<p>Pihak Pertama Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya</p>  <p>Gemi Triastutik</p>
--	--

Gambar 8. Perjanjian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024

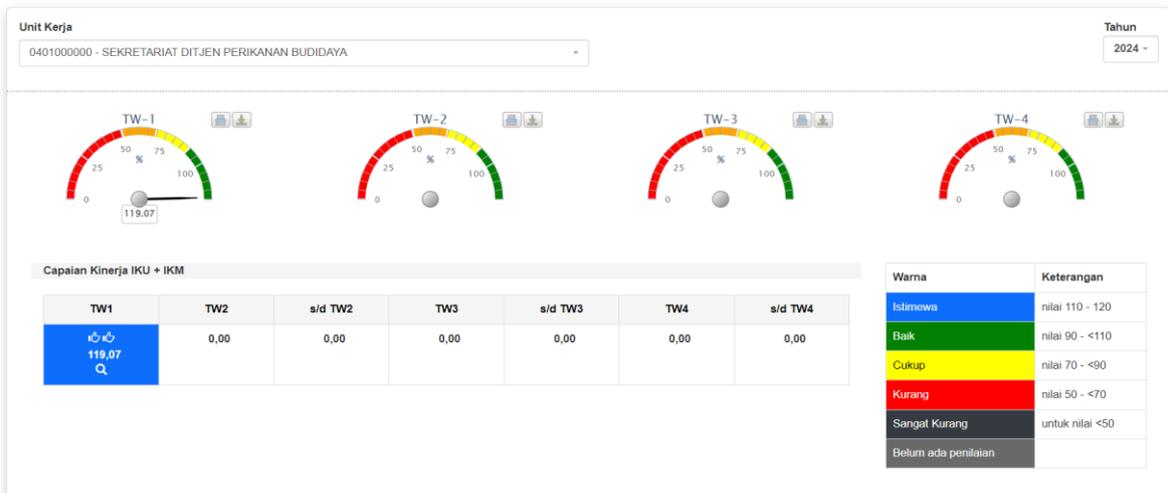
2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024

Pengukuran capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada PK Setditjen Perikanan Budi Daya dengan data pencapaian kinerjanya. Cara pengukuran mengacu pada manual indikator dan pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas.

Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja harus diverifikasi oleh tim kinerja sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat. Pengukuran indikator kinerja yang baik adalah dapat memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga data yang disajikan harus: (i) Valid, diukur menggunakan alat ukur yang tepat sesuai

dengan manual indikator; (ii) *Reliable*, meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan (iii) Obyektif, bebas dari intervensi/kepentingan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala, didukung oleh implementasi dari aplikasi *Balanced Scorecard (BSC)* yaitu Kinerjaku, yang merupakan sistem aplikasi pengelolaan kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses melalui www.kinerjaku.kkp.go.id) ditunjukkan dengan warna : (i) merah (untuk indikator yang di bawah batas toleransi); (ii) kuning (untuk indikator dalam batas toleransi); dan (iii) hijau (untuk indikator yang telah/melebihi target).



NKO Maret - 2024
Unit Kerja: SEKRETARIAT DJTJEN PERIKANAN BUDIDAYA
SKOR KINERJA: 119.07

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Potensi	Perhitungan	Target 2024	Target Maret	Capaian Maret	%	Target s/d Maret	Capaian s/d Maret	%	Tgl Input
SK-01	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya						119.07			119.07		
SKK-1	Nilai PMI SAKIP Setelgen PB	Nilai	Maximize	Nilai Perseki Akhir	80,00	0,00			0,00	0,00		22-Apr-2024 08:13
SKK-10	Persentase Pemaksimalan Hakudi di Lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya yang Dilenyapi	%	Maximize	Nilai Perseki Akhir	65,00	0,00			0,00	0,00		22-Apr-2024 08:13
SKK-11	Unit Kerja Setelgen PB yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (TMS) (Dukung) ✓ (G)	%	Maximize	Rata-rata	94,00	94,00	133,00	100,00	94,00	133,00	100,00	22-Apr-2024 08:13
SKK-12	Persentase Dokumen Kejasama yang Didinkasjungi Bidang Perikanan Budidaya (Dukung) ✓ (G)	%	Maximize	Akumulasi	90,00	10,00	46,06	100,00	10,00	46,06	100,00	22-Apr-2024 08:13
SKK-13	Persentase Jumlah Pemberian Netral dan Positif terhadap Total Pemberian tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya (Dukung) ✓ (G)	%	Maximize	Rata-rata	86,00	86,00	100,00	116,26	86,00	100,00	116,26	22-Apr-2024 08:13
SKK-14	Status Terbang Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2024	%	Minimize	Nilai Perseki Akhir	100,00	0,00			0,00	0,00		22-Apr-2024 08:13
SKK-15	Persentase Realisasi Hasil Pengawasan yang Diarahkan untuk Perubahan Kinerja Setelgen Perikanan Budidaya (Dukung) ✓ (G)	%	Maximize	Nilai Perseki Akhir	80,00	80,00	100,00	100,00	80,00	100,00	100,00	22-Apr-2024 08:13
SKK-16	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setelgen Perikanan Budidaya	Nilai	Maximize	Nilai Perseki Akhir	93,76	0,00			0,00	0,00		22-Apr-2024 08:13
SKK-17	Tingkat Kepuasan Pengabdian Berbagi Nilai Negara Lingkup Setelgen Perikanan Budidaya	%	Minimize	Nilai Perseki Akhir	80,00	0,00			0,00	0,00		22-Apr-2024 08:13
SKK-18	Nilai Kinerja Anggaran Setelgen Perikanan Budidaya	Nilai	Maximize	Nilai Perseki Akhir	86,00	0,00			0,00	0,00		22-Apr-2024 08:13
SKK-19	Tingkat Kepuasan Pengabdian Berbagi/Utasa Lingkup Setelgen Perikanan Budidaya	%	Maximize	Nilai Perseki Akhir	80,00	0,00			0,00	0,00		22-Apr-2024 08:13
SKK-2	Persentase Pelaku Usaha Budidaya ikan yang terintegrasi KUSUKA (Dukung) ✓ (G)	%	Maximize	Nilai Perseki Akhir	80,00	20,00	45,17	100,00	20,00	45,17	100,00	22-Apr-2024 08:13
SKK-20	Nilai Pengawasan Kejasama Setelgen Perikanan Budidaya	%	Maximize	Nilai Perseki Akhir	80,00	0,00			0,00	0,00		22-Apr-2024 08:13
SKK-21	Persentase Layanan Perikanan Setelgen Perikanan Budidaya	%	Maximize	Nilai Perseki Akhir	80,00	0,00			0,00	0,00		22-Apr-2024 08:13
SKK-22	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggara SMP Unit DJPB	Nilai	Maximize	Nilai Perseki Akhir	3,30	0,00			0,00	0,00		22-Apr-2024 08:13
SKK-23	Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang Mekanisasi PDRPP Mandiri	%	Maximize	Nilai Perseki Akhir	75,00	0,00			0,00	0,00		22-Apr-2024 08:13
SKK-3	Persentase Data Produk Perikanan Budidaya yang Tervalidasi	%	Maximize	Nilai Perseki Akhir	80,00	0,00			0,00	0,00		22-Apr-2024 08:13
SKK-4	Persentase Data Realisasi Informasi Geospasial Tematik (GT) Lahan Perbudidaya ikan yang Terintegrasi	%	Maximize	Nilai Perseki Akhir	100,00	0,00			0,00	0,00		22-Apr-2024 08:13
SKK-5	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setelgen Perikanan Budidaya	Indeks	Maximize	Nilai Perseki Akhir	85,00	0,00			0,00	0,00		22-Apr-2024 08:13
SKK-6	Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budidaya	Indeks	Maximize	Nilai Perseki Akhir	75,00	0,00			0,00	0,00		22-Apr-2024 08:13
SKK-7	Indeks Penyelenggaraan SAR Aparatur DJPB	%	Maximize	Nilai Perseki Akhir	3,00	0,00			0,00	0,00		22-Apr-2024 08:13
SKK-8	Nilai Rata-rata Hasil Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menengah Wilayah Bebas dan Konsep (WBK) Oleh Tim Penilaian Internal KKP	Unit	Maximize	Nilai Perseki Akhir	76,00	0,00			0,00	0,00		22-Apr-2024 08:13
SKK-9	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Budidaya	%	Maximize	Nilai Perseki Akhir	100,00	0,00			0,00	0,00		22-Apr-2024 08:13

Gambar 9. Dashboard Capaian Kinerja Setditjen PB

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Capaian target kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan 1 tahun 2024 telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Keberhasilan capaian dapat terlihat pada nilai capaian IKU dan IK Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya dengan nilai NPSS sebesar 119,07 dengan didukung oleh anggaran sebesar Rp.111.906.162.000 dan telah terealisasi Rp.20.532.996.666 atau sebesar 18,35% (sumber data aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan). Terkait hal tersebut, maka segala upaya perbaikan akan terus dilakukan guna meningkatkan kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2024 dengan capaian kinerja yang dihasilkan sampai Tahun 2024.

Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi Kinerjaku, pengukuran capaian kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUN 2024	TARGET TRIWULAN I	CAPAIAN TRIWULAN I	(%)
1	Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Sekretariat DJPB	1	Nilai PM SAKIP Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya	80,5			
		2	Persentase Pelaku Usaha Budidaya ikan yang Terintegrasi KUSUKA	80	20	45,77	120
		3	Persentase Data Produksi Perikanan Budidaya yang Tervalidasi	80			
		4	Persentase Realisasi Data Informasi Geospasial Termatik (IGT) Lahan Pembudidayaan ikan yang Terintegrasi	100			

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	TARGET TRIWULAN I	CAPAIAN TRIWULAN I	(%)
Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Sekretariat DJPB	5	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen Perikanan Budi Daya	85			
	6	Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya	75			
	7	Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB	3			
	8	Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP	76			
	9	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Budidaya	100			
	10	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani	65			
	11	Unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	94	94	133	120
	12	Persentase Dokumen Kerjasama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budi Daya	90	10	46,66	120
	13	Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya	86	86	100	116,28

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUN 2024	TARGET TRIWULAN I	CAPAIAN TRIWULAN I	(%)
Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Sekretariat DJPB	14	Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ditjen PB dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen PB Tahun 2024	100				
	15	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya	80	80	100	120	
	16	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya	93,76				
	17	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya	80				
	18	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya	86				
	19	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya	80				
	20	Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen Perikanan Budi Daya	80				
	21	Persentase Layanan Perkantoran Setditjen Perikanan Budi Daya	80				
	22	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggara SPIP Unit DJPB	3,3				
	23	Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP)	75				

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	TARGET TRIWULAN I	CAPAIAN TRIWULAN I	(%)
	yang Melaksanakan PEKPPP Mandiri				

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Mengukur kinerja tidak hanya dengan melakukan *entry* data capaian, namun juga analisis terhadap pencapaian kinerjanya, karena dengan melakukan analisis kinerja, informasi mengenai kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat diketahui dan bermanfaat untuk ketepatan penyusunan strategi peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya. Pengukuran capaian kinerja pada masing-masing IK sebagai berikut:

SK.01 Tatakelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu sistem atau cara pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam wujud tanggung jawab yang meliputi wewenang: administrasi, ekonomi hingga politik untuk mengatur segala permasalahan sosial negara. Sejatinya, tata kelola pemerintahan tersebut senantiasa memiliki orientasi terhadap suatu hal yang hendak dituju, yaitu untuk mencapai pemerintahan yang ideal.

IKSK.1 Nilai PM SAKIP Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya

SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja (Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP).

Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di DJPB. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 5 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (10%), dan capaian kinerja (20%).

Capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya berdasarkan hasil penilaian Kemenpan RB atas implementasi SAKIP di DJPB dengan menggunakan instrumen (lembar Kerja Evaluasi) yang sudah dirumuskan oleh KEMENPAN-RB.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 80,5 (nilai). Pada periode triwulan 1 ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada 2 kegiatan, yaitu

Layanan Perencanaan dan Penganggaran dan Layanan Pemantauan dan Evaluasi dengan capaian pada triwulan 1 yakni sebesar 18,91% dari anggaran sebesar Rp. 5.370.141.000.

Tabel 2. Capaian Nilai PM SAKIP Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Nilai PM SAKIP Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian				
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-		80,5					-	80,5	

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Nilai PM SAKIP Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
		Realisasi 2017-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	-	-	59,05	80,5			80,5	

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu melakukan penyusunan dokumen pendukung mengacu pada dokumen SAKIP (PK, rencana aksi, evaluasi rencana aksi, aplikasi Kinerja, LKj), melakukan verifikasi capaian pada aplikasi kinerja KKP dan menyusun pedoman evaluasi SAKIP lingkup DJPB.

Kendala yang dihadapi yaitu tata cara penilaian mandiri SAKIP menggunakan perhitungan yang berbeda mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu memperbaiki:

1. Penyediaan dokumen perencanaan kinerja yang SMART, memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*), serta memanfaatkan secara berkesinambungan;
2. Pengukuran kinerja yang efektif dan efisien dengan pemberian *reward* and *punishment* dengan mengacu pada peraturan per-UU yang berlaku;
3. Menggambarkan gambaran dampak strategi/kebijakan dalam pencapaian kinerja pada pelaporan kinerja;
4. Peningkatan kualitas SDM yang melaksanakan dan mengimplementasikan SAKIP di lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya.

IKSK.2 Persentase Pelaku Usaha Budidaya ikan yang Terintegrasi KUSUKA

Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Pemerintah dan pendataan kepada pelaku usaha agar tepat sasaran, maka KKP melakukan identifikasi terhadap para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan dengan diterbitkannya Kartu KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan).

Kartu KUSUKA berfungsi sebagai Identitas profesi Pelaku Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan; basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan, pelayanan, dan pembinaan kepada Pelaku Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan; dan sarana untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian.

Persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi KUSUKA, merupakan penilaian atas capaian pendataan pelaku usaha yang telah terdaftar di database KUSUKA dengan status submit valid dan revisi. Pendataan pelaku usaha bertujuan untuk mengumpulkan/*updating* data pelaku usaha budidaya ikan.

Target yang ditetapkan tahun 2023 untuk indikator kegiatan ini adalah 80 (persen) dengan capaian pada triwulan 1 sebesar 120% (capaian maksimal pada aplikasi kinerjaku) dari target yang ditetapkan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Data dan Informasi, Supervisi Data Perikanan Budidaya dan Data KUSUKA dengan anggaran sebesar Rp.1.379.776.

Tabel 3. Capaian Persentase Pelaku Usaha Budidaya ikan yang Terintegrasi KUSUKA

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Persentase Pelaku Usaha Budidaya ikan yang Terintegrasi KUSUKA							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian				
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-		80	20	45,77	120	120	-	80	120

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya											
Indikator Kinerja		Persentase Pelaku Usaha Budidaya ikan yang Terintegrasi KUSUKA											
Realisasi 2017-2023							2024				Renstra 2020-2024		
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Target TW 1	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024	
-	-	-	-	-	-	116,01	80	20	45,77	120	80	120	

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu:

1. Mengirimkan surat permintaan enumerator ke seluruh dinas provinsi dan upt lingkup puslatluh BPPSDMKP untuk meminta petugas enumerator,

2. Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka konsolidasi kesiapan enumerator dalam melakukan pendataan di tahun 2024,
3. Melaksanakan rapat dalam rangka sosialisasi metodologi pengumpulan data lingkup perikanan budidaya

Kendala yang dihadapi yaitu kendala yang dihadapi enumerator terutama terkait penggunaan aplikasi pada wilayah wilayah remote yang belum terjangkau oleh jaringan internet sehingga memperlambat pencapaian target.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu melanjutkan rencana aksi triwulan satu dan berkoordinasi dengan PUSDATIN dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mempercepat pencapaian target integrasi.

IKSK.3 Persentase Data Produksi Perikanan Budidaya yang Tervalidasi

Data produksi adalah catatan atas kumpulan fakta mengenai suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda. Produksi ikan adalah semua hasil penangkapan/budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Volume produksi dihitung dalam bentuk berat basah ikan hasil tangkapan/Budidaya.

Budidaya perikanan didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk memproduksi biota (organisme) akuatik secara terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan (profit). Definisi Budidaya perikanan lainnya adalah campur tangan (upaya-upaya) manusia untuk meningkatkan produktivitas perairan. Validasi adalah pengesahan atau pengujian kebenaran atas sesuatu.

Persentase Data Produksi Perikanan Budidaya yang tervalidasi, merupakan penilaian atas capaian realisasi pendataan produksi sampling tervalidasi yang telah ditetapkan dibandingkan dengan target sampling serta capaian atas validasi nasional pada aplikasi dalam ruang lingkup pendataan produksi kelautan dan perikanan.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 80 (persen). Pada periode triwulan 1 ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Data dan Informasi, Validasi dan Supervisi Data Perikanan Budidaya dengan capaian pada triwulan 1 yakni sebesar 11,58% dari anggaran sebesar Rp.1.083.386.000.

Tabel 4. Capaian Persentase Data Produksi Perikanan Budidaya yang Tervalidasi

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Persentase Data Produksi Perikanan Budiaya yang Tervalidasi							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian				
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra

-	80						-	80
---	----	--	--	--	--	--	---	----

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Persentase Data Produksi Perikanan Budiaya yang Tervalidasi									
		Realisasi 2017-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	-	-	98,74	80			80	

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini yaitu:

1. Melaksanakan supervisi terhadap kinerja validator di kab/kota agar mempercepat proses validasi data di tingkat provinsi dan kab kota,
2. Menghadiri acara validasi data yang dilaksanakan oleh provinsi,
3. Melakukan validasi data setiap hari melalui aplikasi satudata,
4. Mensosialisasikan metode validasi data terhadap validator kab/kota.

Kendala yang dihadapi yaitu sistem satudata terkadang ada jenis ikan yang belum terdaftar sehingga perlu waktu untuk melengkapi terlebih dahulu dan jika tidak ada di database jenis ikannya akan digantikan dengan jenis ikan lain yang masih dekat kekerabatannya sehingga tidak bisa sama 100%.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu melanjutkan rencana aksi triwulan satu dan berkoordinasi dengan PUSDATIN dan pihak - pihak terkait lainnya untuk mempercepat pencapaian target integrasi.

IKSK.4 Persentase Realisasi Data Informasi Geospasial Termatik (IGT) Lahan Pembudidayaan ikan yang Terintegrasi

Geospasial dan Informasinya diatur dengan UU 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Informasi Geospasial (IG) adalah Data Geospasial (DG) yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.

Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar (IGD).

Persentase Realisasi Data IGT lahan pembudidayaan ikan yang Terintegrasi, merupakan penilaian atas capaian realisasi pengintegrasian data IGT lahan pembudidayaan ikan yang telah dilakukan oleh unit data eselon 1 sesuai matriks rencana aksi yang telah ditetapkan oleh masing-masing unit kerja.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 100 (persen). Pada periode triwulan 1 ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini

sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Data dan Informasi dan Validasi Peta Lahan Pembudidayaan dengan anggaran sebesar Rp.341.134.000.

Tabel 5. Capaian Persentase Realisasi Data Informasi Geospasial Termatik (IGT) Lahan Pembudidayaan ikan yang Terintegrasi

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Persentase Realisasi Data Informasi Geospasial Termatik (IGT) Lahan Pembudidayaan ikan yang Terintegrasi							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi		Capaian			
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-		100					-	100	

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Persentase Realisasi Data Informasi Geospasial Termatik (IGT) Lahan Pembudidayaan ikan yang Terintegrasi									
Realisasi 2017-2023							2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	-	-	100	100			100	

Untuk mendukung pencapaian Indikator ini, ada beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 yaitu:

1. Merancang draft KAK,HPS dan rancangan kontrak tenaga ahli,
2. Koordinasi dengan PUSDATIN untuk penyediaan citra satelit,
3. Koordinasi dengan BIG untuk langkah langkah pelaksanaan deliniasi,
4. Sosialisasi proses deliniasi kepada eslon 2 lingkup DJPB.

Sampai dengan triwulan I tahun 2024 belum ditemukan kendala dalam upaya pencapaian IKU ini.

IKSK.5 Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen PB

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada

Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

- 1) Kualifikasi, diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan
 - f. Pendidikan di bawah SLTA.
- 2) Kompetensi, diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir.
- 3) Kinerja, diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi :
 - a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
 - b. Perilaku kerja.
- 4) Disiplin, diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi :
 - a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan
 - b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 85 (indeks). Pada periode triwulan 1 ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada setiap semester tahun berjalan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Manajemen Pengembangan dan Pembinaan Disiplin ASN dengan capaian pada triwulan 1 yakni sebesar 51,76% dari anggaran sebesar Rp.1.577.585.000.

Tabel 6. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen PB

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya								
Indikator Kinerja		Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen PB								
2023		2024				% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi		Capaian				
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra	
-		85					-	85		

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya		
Indikator Kinerja		Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen PB		
		Realisasi 2017-2023		2024
				Renstra 2020-2024

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	60,61	57,48	85,80	84,41	90,16	85			85	

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini yaitu:

1. Mengikuti kegiatan sosialisasi
 - a. Sosialisasi Talent Need Analysis (TNA), di Bandung pada tanggal 24 s.d. 26 Januari 2024 sejumlah 2 orang.
 - b. Sosialisasi Pembaharuan Fitur Aplikasi Kinerja BKN di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2024 sejumlah 2 orang.
2. Telah dilaksanakan Pembinaan Jiwa Korsa lingkup DJPB di Jakarta, pada tanggal 19 s.d. 20 Januari 2024 (berupa pelatihan non klasikal), diikuti oleh 385 orang.
3. Telah dilaksanakan pembinaan kode etik dan disiplin ASN lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya
 - a. Telah dilaksanakan pembinaan kode etik dan disiplin ASN lingkup Sekretariat DJPB di Jakarta, pada tanggal 20 Maret 2024 (pelanggaran terhadap pelaksanaan tugas belajar)
 - b. Telah dilaksanakan pembinaan kode etik dan disiplin ASN lingkup Sekretariat DJPB di Jakarta, pada tanggal 26 Maret 2024 (pelanggaran terhadap ketentuan hari dan jam kerja)
4. Telah dilaksanakan evaluasi kinerja ASN lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya untuk Periode Triwulan IV dan Periode Final Tahun 2023, pada Bulan Januari 2024

Kendala yang dihadapi yaitu:

1. Data base yang diperlukan untuk penyusunan TNA belum tersedia.
2. Laporan perkembangan tugas belajar yang disampaikan belum mencerminkan perkembangan studi/ individu petugas belajar.
3. Terkendala kesulitan melakukan monitoring kehadiran yang bersangkutan, karena setiap hari kerja melakukan presensi, namun tidak hadir di ruang kerja.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu:

1. Membuat data base yang diperlukan untuk penyusunan TNA
2. Membuat monitoring perkembangan tugas belajar
3. Membuat rekapitulasi kehadiran triwulan I
4. Menyusun sasaran kerja pegawai Tahun 2024 dan melakukan evaluasi kinerja periode Triwulan I Tahun 2024

IKSK.6 Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya

Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya adalah upaya untuk mengelola, meningkatkan dan mengendalikan standar profesi Jabatan Fungsional di bidang Perikanan Budi Daya, yang terdiri atas 4 (empat) jabatan fungsional, yaitu (1) Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Kategori Keahlian /Analisis Akuakultur, (2) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Kategori Keahlian/ Pengelola Kesehatan Ikan, (3) Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Kategori Keterampilan/Teknisi Akuakultur, dan (4) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Kategori Keterampilan/Teknisi Kesehatan Ikan, dengan lingkup pengelolaan yang meliputi pembinaan, pemberian rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional, penilaian kinerja, penyusunan pedoman, penata laksanaan administrasi jabatan fungsional, dan fasilitatif pengembangan karir jabatan fungsional bidang perikanan budi daya.

Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya dalam upaya peningkatan dan pengendalian standar profesi Jabatan Fungsional berdasarkan Permen PAN RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS, Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Menduduki Jabatan Fungsional, Per BKN Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional, dan Keputusan Menteri KP Nomor 69 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 75 (indeks). Pada periode triwulan 1 ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional dengan capaian pada triwulan 1 yakni sebesar 10,76% dari anggaran sebesar Rp.1.538.250.000.

Tabel 7. Capaian Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya									
2023		2024				% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024		Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi		Capaian					
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra		
-		75						-	75		

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya		
Indikator Kinerja		Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya		
		Realisasi 2017-2023		2024
				Renstra 2020-2024

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	-	-	85,80	75			75	

Untuk mendukung pencapaian Indikator ini, beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yaitu:

1. Melaksanakan Koordinasi pengelolaan jabatan fungsional bidang perikanan budi daya dengan instansi daerah,
2. Pada Triwulan I, telah dilaksanakan penyesuaian nomenklatur jabatan dari jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Kategori Keahlian menjadi Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan, dan pengangkatan melalui penyesuaian nomenklatur jabatan dari jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Kategori Keterampilan menjadi Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan,
3. Melakukan penyusunan dan penetapan angka kredit (PAK) Integrasi pejabat fungsional bidang perikanan budi daya pada Instansi Daerah,
4. Melakukan inventarisasi penetapan angka kredit (PAK) jabatan fungsional bidang perikanan budi daya,
5. Pada bulan Februari 2024 Telah dilaksanakan verifikasi dan validasi terhadap usulan kebutuhan jabatan fungsional bidang perikanan budi daya untuk instansi daerah,
6. Pada Bulan Maret telah dilaksanakan penilaian kompetensi periode I Tahun 2024 yang diselenggarakan dalam bentuk uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dalam rangka perpindahan ke dalam jabatan fungsional bidang perikanan budi daya.

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan ini antara lain :

1. Terdapat beberapa usulan rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional bidang perikanan budi daya pada instansi daerah yang belum sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan,
2. PAK jabatan fungsional Pengawas Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan belum dapat dikonversikan karena terkendala Perubahan nomenklatur jabatan fungsional,
3. Belum tersosialisikannya pedoman terbaru terkait standar kompetensi jabatan fungsional dan penilaian kompetensi yang menyebabkan diferensiasi pemahaman peserta uji kompetensi.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu:

1. Melakukan sosialisasi/informasi terkait jabatan fungsional bidang perikanan budi daya,
2. Berkoordinasi dengan Biro SDM Aparatur dan Organisasi terkait perubahan nomenklatur jabatan fungsional Pengawas Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan,
3. Berkoordinasi dengan Biro SDM Aparatur dan Organisasi dalam penyelenggaraan penilaian kompetensi,
4. Melaksanakan Penyusunan Pedoman Jabatan Fungsional bidang Perikanan Budi Daya,

- Berkoordinasi dengan Biro SDMAO, terkait proses administrasi dan penetapan kebutuhan jabatan fungsional bidang perikanan budidaya.

IKSK.7 Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB

Pengelolaan SDM Aparatur adalah proses pengelolaan SDM Aparatur mulai dari pengangkatan hingga pemberhentian bagi SDM Aparatur lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya. Proses tersebut dibagi dalam 3 (tiga) rumpun, yaitu : (1) proses Mutasi, yang terdiri dari proses pengangkatan CANS, pengangkatan CPNS menjadi PNS, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengangkatan pertama dalam jabatan, perpindahan jabatan, pencantuman gelar pendidikan, proses peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, perpindahan SDM Aparatur dan pemberhentian; (2) proses ketatausahaan, yang terdiri dari proses pembuatan kartu pegawai/istri/suami, proses izin cuti, dan pemberian penghargaan atau sanksi, dan (3) informasi ASN, yang terdiri dari : rekapitulasi kehadiran, perhitungan tunjangan kinerja, pelaksanaan pengambilan sumpah PNS, dan peremajaan data ASN.

Indeks pengelolaan SDM Aparatur merupakan pengukuran kualitas proses pengelolaan SDM Aparatur, yang menyatakan tingkat penyimpangan proses dalam stantar mutu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Target yang ditetapkan tahun 2023 untuk indikator kegiatan ini adalah 3 (persen). Pada periode triwulan 1 ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Manajemen SDM dengan capaian pada triwulan 1 yakni sebesar 15,46% dari anggaran sebesar Rp.684.165.000.

Tabel 8. Capaian Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya								
Indikator Kinerja		Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB								
2023		2024				% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi		Capaian				
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra	
-		3					-	3		

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB									
		Realisasi 2017-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	-	-	6	3			3	

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu:

1. Kegiatan yang mendukung komponen usul kebutuhan ASN
 - a. Telah dilaksanakan Penyusunan Kebutuhan ASN Tahun 2024 di Kota Bekasi pada tanggal 16 s.d. 19 Januari 2024
 - b. Telah dilaksanakan Penginputan Usul Nomor Induk (NI) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, pada tanggal 5 s.d. 7 Februari 2024
 - c. Telah dilaksanakan penyusunan perincian kebutuhan ASN Tahun 2024 di Kota Cirebon pada tanggal 19 s.d. 22 Maret 2024.
2. Kegiatan yang mendukung komponen pengembangan kompetensi
Telah diusulkan kebutuhan tugas belajar dan izin belajar tahun 2024 pada 22 Maret 2024.
3. Kegiatan yang mendukung komponen proses mutasi
 - a. Kenaikan Pangkat
 - 1) Telah diproses usul kenaikan pangkat Periode 1 Februari 2024 sejumlah 4 orang (batas akhir pengusulan melalui SIASN pada tanggal 15 Januari 2024)
 - 2) Telah diproses usul kenaikan pangkat Periode 1 April 2024 sejumlah 24 orang (batas akhir pengusulan melalui SIASN pada tanggal 28 Februari 2024)
 - b. Pencantuman Gelar Pendidikan
 - 1) Selama Triwulan I Tahun 2024 telah diusulkan pencantuman gelar sejumlah 6 orang
 - 2) Selama Triwulan I Tahun 2024 telah diusulkan peningkatan pendidikan sejumlah 3 orang
 - c. Kenaikan gaji berkala
Selama Triwulan I Tahun 2024 telah ditetapkan surat kenaikan gaji berkala sejumlah 10 orang Dit POI
 - d. Pemberhentian
Selama Triwulan I Tahun 2024 telah diproses usul pemberhentian PNS sejumlah 11 orang
 - e. Pelantikan
Selama Triwulan I Tahun 2024 telah dilaksanakan Pelantikan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan dan Teknisi Kesehatan Ikan pada 15 Februari 2024
4. Kegiatan yang mendukung komponen proses ketatausahaan
 - a. Penghargaan
 - 1) Telah dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen usul penghargaan Satyalancana Karya Satya, pada Bulan Januari 2024
 - 2) Telah dilaksanakan Kegiatan Penilaian Penghargaan Bintang Jasa dan Satyalancana Wira Karya di Jakarta, pada tanggal 6 Maret 2024
 - 3) Telah dilaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen usul penghargaan Bintang Jasa dan Satyalancana Wira Karya di Serang pada 26 s.d. 28 Maret 2024
 - b. LHKAN

Seluruh ASN DJPB telah memenuhi kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN untuk Penyelenggara Negara dan SPT Pajak untuk non Penyelenggara Negara

c. Administrasi SKP

Pada Bulan Maret 2024 telah diusulkan proses penandatanganan evaluasi kinerja ke Menteri Kelautan dan Perikanan sejumlah 1 orang, dan telah diproses penandatanganan evaluasi kinerja oleh Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya sejumlah 19 orang

5. Kegiatan yang mendukung komponen informasi kepegawaian

Telah dilakukan peremajaan data pada SIASN untuk data jabatan dan data keluarga, dan SIMPEG KKP untuk data jabatan.

Kendala yang dihadapi yaitu:

1. Untuk komponen usul kebutuhan ASN

- a. Beberapa usulan yang disampaikan unit kerja belum sesuai dengan peta jabatan sebagaimana dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64 Tahun 2022
- b. Terdapat beberapa dokumen kelengkapan berkas yang perlu perbaikan oleh calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- c. Terdapat beberapa kualifikasi pendidikan yang belum mendapatkan rekomendasi kualifikasi pendidikan oleh instansi pembina

2. Untuk komponen proses mutasi

: Masih terdapat usulan yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3. Untuk komponen proses ketatausahaan

: Masih terdapat usulan yang belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu:

1. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan proses perencanaan dan pengadaan ASN
2. Membuat usulan calon penerima penghargaan Bintang Jasa, Satyalancana Wira Karya, dan Satyalancana Karya Satya
3. Proses mutasi
 - a. Membuat surat pengembalian berkas usul layanan mutasi yang belum memenuhi syarat
 - b. Membuat rencana kenaikan pangkat Periode 1 Juni 2024 dan Periode 1 Agustus 2024
 - c. Membuat monitoring usul pencantuman gelar pendidikan
 - d. Membuat monitoring Kenaikan Gaji Berkala
 - e. Membuat monitoring usul pemberhentian

IKSK.8 Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan menunjuk satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai unit kerja berstatus WBK/WBBM, dengan persyaratan antara lain dianggap sebagai unit penting/strategis dalam melaksanakan pelayanan publik, mengelola sumber daya yang cukup besar, dan memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup baik.

Pembangunan ZI menuju WBK-WBBM merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi di beberapa unit kerja yang bertujuan membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Proses penetapan predikat WBK/WBBM dilakukan berdasarkan penilaian berjenjang dimulai dari penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI) KKP, kemudian Tim Penilai Nasional (TPN) yaitu Kementerian PAN-RB dengan mengacu pada kriteria penilaian yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah.

Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) merupakan suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, yaitu:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,25, dengan nilai sub komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal 15,75 (survei 3,60) Nilai Sub Komponen “kinerja lebih baik” minimal 2,50;
4. Memiliki nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal 14,00 (survei 3,20).

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 76 (unit). Pada periode triwulan 1 ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal serta Pembangunan Zona Integritas WBK/ WBBM dengan capaian pada triwulan 1 yakni sebesar 43,73% dari anggaran sebesar Rp.252.000.000.

Tabel 9. Capaian Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian				
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-		76					-	76	

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP									
Realisasi 2017-2023							2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	5	-	8	11	79,93	76			76	

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini, ada beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 yaitu:

1. Mengikuti rapat koordinasi persiapan penilaian WBK/WBBM lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Inspektorat V Itjen KKP pada tanggal 17 Januari 2024 di Ruang Rapat Integritas-Inspektorat V KKP Gedung Mina Bahari II Lantai 5 Gambir Jakarta Pusat sesuai dengan Undangan Inspektur V Itjen KKP Nomor B.13/ITJ.5/TU.330/I/2024 Tanggal 15 Januari 2024 Tentang Undangan Rapat Persiapan Penilaian WBK/WBBM Tahun 2024;
2. Pengajuan usulan unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang akan dinilai untuk mendapat predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan KKP tahun 2024 kepada Inspektorat Jenderal KKP selaku Tim Penilai Internal (TPI) KKP melalui Nota Dinas Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 129/DJPB/KP.750/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 Tentang Pengajuan Unit Kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang Akan Dinilai Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan KKP Tahun 2024. Unit kerja yang diusulkan adalah BPBAT Tatelu, BLUPPB Karawang, BPIU2K Karangasem dan BPKIL Serang.
3. Asistensi (Pendampingan) Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dalam rangka pemenuhan dokumen bukti dukung sebagai berikut:
 - a. pendampingan di BPIU2K Karangasem pada tanggal 20-23 Februari 2024 dan 19-22 Maret 2024;
 - b. pendampingan di BPBAP Takalar pada tanggal 27 Februari-1 Maret 2024;
 - c. pendampingan di BLUPPB Karawang pada tanggal 13-16 Maret 2024;

d. pendampingan di BPKIL Serang pada tanggal 20-23 Februari 2024 dan 13-16 Maret 2024;

Kendala yang dihadapi yaitu unit kerja belum disiplin dalam melakukan *update* dokumen data dukung penilaian sehingga simulasi nilai yang diperoleh pada saat asistensi (pendampingan) kadang belum optimal.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu meningkatkan koordinasi dengan unit kerja yang telah diusulkan untuk mengikuti penilaian TPI/TPN tahun 2024 untuk *mengupdate* dokumen/data dukung pelaksanaan pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM dan menindaklanjuti temuan hasil evaluasi APIP (Itjen KKP/BPK RI) agar unit kerja yang telah diusulkan dapat memperoleh nilai yang optimal pada saat dinilai oleh Tim Penilai Internal (TPI) KKP.

IKSK.9 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perikanan Budidaya

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Budidaya adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 100 (persen). Pada periode triwulan 1 ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada setiap semester tahun berjalan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Hukum dan Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan capaian pada triwulan 1 yakni sebesar 10,69% dari anggaran sebesar Rp.919.930.000.

Tabel 10. Capaian Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perikanan Budidaya

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perikanan Budidaya							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian				
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-		100					-	100	

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya
Indikator Kinerja	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perikanan Budidaya

Realisasi 2017-2023							2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
87,50	87,50	108,33	70,00	100	100	100	100			100	

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini yaitu penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan budidaya khususnya terkait rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Nomor 37/PERMEN-KP/2019 tentang Pengendalian Residu Pada Kegiatan Pembudidayaan Ikan Konsumsi.

Terdapat kendala dalam penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang perikanan budidaya bahwa dalam pelaksanaan pembahasan kurang intensif (tidak dihadiri oleh pejabat yang kompeten dan berwenang memutuskan).

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu melakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Nomor 37/PERMEN-KP/2019 tentang Pengendalian Residu Pada Kegiatan Pembudidayaan Ikan Konsumsi.

IKSK.10 Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani

Advokasi hukum adalah pemberian layanan hukum kepada penerima advokasi yang menghadapi masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya.

Advokasi terdiri dari (1) konsultasi hukum, (2) pendapat hukum, (3) pendampingan hukum, dan (4) penyelesaian permasalahan hukum.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 65 (persen). Pada periode triwulan 1 ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Hukum dan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum dengan capaian pada triwulan 1 yakni sebesar 2,02% dari anggaran sebesar Rp.330.070.000.

Tabel 11. Capaian Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani									
2023		2024				% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024		
Realisasi		Target		Realisasi		Capaian					
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra		
-		65					-	65			

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani									
Realisasi 2017-2023							2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	-	-	65	65			65	

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini, kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 yaitu penyiapan materi pendampingan dan konsultasi hukum terhadap panggilan untuk klarifikasi dari Polda Metro Jaya terkait pengadaan barang dan jasa dibidang perikanan budidaya.

Kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan dokumen dalam penyusunan bahan advokasi.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu melakukan rapat pembahasan penyiapan bahan advokasi pemanggilan selanjutnya.

IKSK.11 Unit Kerja Setditjen Perikanan Budi Daya yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar *Collaboration Office* adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan dan mendistribusikan pengetahuan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sasaran Strategis dari Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar *Collaboration Office* ini adalah Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah di akses, agar dapat mencapai nilai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.

Pengukuran IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar KKP menggunakan platform Portal *Collaboration Office* <https://portal.kkp.go.id>. Terdapat menu Linimasa yaitu merupakan salah satu halaman pada menu Pengetahuan yang menampilkan postingan atau unggahan dari pimpinan atau pegawai yang memiliki hak akses untuk membuat postingan.

Komponen penilaian pada sistem manajemen pengetahuan terstandar *Collaboration Office* yaitu keaktifan (100%) maksimal nilai yang dapat diterima pegawai yang wajib dinilai, yaitu pejabat Eselon II.

Penghitungan indikator manajemen pengetahuan berasal dari penilaian komponen keaktifan yang dilakukan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin

upload keaktifan dan maksimal 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.

Adapun formula untuk penghitungan capaian indikator tersebut, terdiri dari :

1. Kegiatan dengan memenuhi unsur 5W1H (*What, When, Where, Who, Why dan How*) dengan sumber pengetahuan yang jelas akan mendapatkan poin 0,5.
2. Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk infografis dengan sumber pengetahuan yang jelas akan mendapatkan poin 1.
3. Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk konten video/jurnal akan mendapatkan poin 3.

Selain itu, juga terdapat cara mengukur capaian yaitu dengan menghitung keaktifan pada setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan dan maksimal 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah di tentukan. Pengukuran level 1 dihitung dengan keaktifan pejabat Eselon II yang memenuhi unsur pengetahuan sesuai kriteria.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 94 (persen). Pada periode triwulan 1 indikator ini telah tercapai sebesar 133% dari target triwulan 1 sebesar 94%, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Hubungan Masyarakat dengan capaian pada triwulan 1 sebesar 5,22% dari anggaran sebesar Rp.685.242.000.000.

Tabel 12. Capaian Unit kerja Setditjen PB yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Unit kerja Setditjen PB yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian				
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-		94	94	133	120	120	-	94	120

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya											
Indikator Kinerja		Unit kerja Setditjen PB yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar											
		Realisasi 2017-2023						2024				Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Target TW 1	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024	
51,8	72,33	92,47	100	100	100	130	94	94	133	120	94	120	

Kegiatan yang dilakukan pada triwulan 1 tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu:

1. Melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan setiap eselon 2 DJPB terkait dengan tata cara penggunaan aplikasi *platform portal collaboration office*.

2. Mengingatkan para peserta untuk postingan memenuhi unsur 5W1H (*What, When, Where, Who, Why, dan How*).
3. Berkoordinasi dengan Pusdatin untuk informasi peserta yang belum aktif, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh peserta sehingga dapat diatasi.

Kendala yang dihadapi yaitu perlu mengingatkan para peserta baik secara formal maupun informal terkait pemenuhan unsur 5W1H serta dalam melakukan jumlah postingan harus mencapai nilai 4 poin.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu (i) menekankan untuk mematuhi standar 5W1H pada saat melakukan postingan, dan (ii) melakukan permohonan jika ada usulan perubahan nama dan jabatan di lingkup pusat dan UPT DJPB kepada Pusdatin.

IKSK.12 Persentasi Dokumen Kerjasama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budi Daya

Perjanjian adalah kesepakatan antara Ditjen Perikanan Budi Daya dengan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kegiatan tertentu di bidang perikanan budidaya yang dituangkan secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban serta mengikat para pihak, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN/2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kelautan dan Perikanan.

Prakarsa kerja sama dapat berasal dari internal Ditjen Perikanan Budi Daya maupun dari calon mitra Kerja Sama. Dokumen kerja sama bidang perikanan budi daya merupakan bentuk nota kesepakatan atau perjanjian kerja sama yang sudah ditandatangani antara 2 (dua) pihak atau lebih.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 90 (persen). Pada periode triwulan 1 indikator ini telah tercapai sebesar 46,66% dari target triwulan 1 sebesar 10%, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Hubungan Masyarakat dan Kerjasama dengan capaian pada triwulan 1 sebesar 17,38% dari anggaran sebesar Rp.1.602.000.000.

Tabel 13. Capaian Persentasi Dokumen Kerjasama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Persentasi Dokumen Kerjasama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budi Daya							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian				
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-		90	10	46,6	120	120	-	90	120

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya
-------------------	---

Indikator Kinerja		Persentasi Dokumen Kerjasama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budi Daya										
Realisasi 2017-2023							2024				Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Target TW 1	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
95	-	89,05	90,26	94,74	100	100	90	10	46,6	120	90	120

Adapun kegiatan yang dilakukan selama triwulan 1 tahun 2024 untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan review perjanjian kerja sama antara BPBAT Tatelu dengan Balai Perasyarakatan Kelas I Manado tentang Pembimbingan Kemandirian Bagi Klien Perasyarakatan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
2. Review perjanjian kerja sama antara BPBAT Tatelu dengan Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Bitung Kantor Wilayah Sulawesi Utara tentang Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Perasyarakatan Melalui Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar.
3. Review perjanjian kerja sama antara BPBAT Mandiangin dengan PT Rimba Makmur Utara tentang Pengembangan Budidaya Ikan Gabus Haruan pada Areal PT Rimba Makmur Utama di Kab. Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Melakukan rapat pembahasan IA antara DJPB dengan Vietnam.
5. Membuat draft/konsep perjanjian kerjasama antara DJPB dengan Kab.Maluku Tenggara tentang Pengembangan Budi Daya Rumput Laut dalam rangka Modeling Budi Daya dan Hilirisasi Rumput Laut di Kab.Maluku Tenggara.
6. Membuat draft/konsep perjanjian kerjasama antara DJPB dengan Kab.Rote Ndao tentang Pengembangan Budi Daya Rumput Luat dalam rangka Modeling Budi Daya dan Hilirisasi Rumput Laut di Kab.Rote Ndao.
7. Rapat pembahasan rencana aksi perjanjian kerjasama dengan PUPR.

Adapun kendala yang dihadapi untuk pencapaian indikator ini adalah terkait proses pembahasan draft perjanjian kerja sama dan rencana aksi maupun *Implementation Arrangement* (IA) serta negosiasi antara Ditjen Perikanan Budi Daya dengan mitra kerja sama membutuhkan waktu yang cukup lama.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya, yaitu melakukan rapat finalisasi pembahasan draft perjanjian kerja sama, finalisasi rencana aksi terhadap perjanjian kerja sama dengan PUPR, persiapan penandatanganan terhadap IA dengan Vietnam yang belum dapat diselesaikan pada triwulan sebelumnya.

IKSK.13 Presentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya

Berita positif adalah kalimat berita yang di dalamnya tidak dijumpai ada pengingkaran. Penghitungan Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya.

Dalam rangka menyebarluaskan pencapaian pembangunan Kelautan dan Perikanan berbasis ekonomi biru, pada sub sektor perikanan budi daya yaitu pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal, salah satu langkah yang dilakukan oleh Sub Bagian Humas Ditjen Perikanan Budi Daya adalah pelaksanaan penyebaran informasi dan publikasi terkait kegiatan kunjungan kerja pimpinan, yaitu kegiatan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya bersama Menteri Kelautan dan Perikanan maupun Tim Komisi IV DPR RI serta stakeholder lainnya. Kegiatan ini dilakukan di berbagai lokasi perikanan budidaya maupun Unit Pelaksana Teknis lingkup DJPB.

Peliputan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut disusun ke dalam bentuk press release, selanjutnya bekerjasama dengan Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebarluaskan pemberitaan tersebut ke berbagai media, baik cetak maupun online.

Perhitungan Rasio jumlah pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang sub sektor perikanan budi daya dihitung dalam kurun periode triwulan. Terdapat komponen dan bobot yang menjadi dasar penilaian dalam menghitung rasio jumlah pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang sub sektor perikanan budi daya terdiri dari 2 (dua) tolak ukur, yaitu: (i) pemberitaan netral dan positif; dan (ii) total pemberitaan sub sektor perikanan budi daya.

Selain itu, juga terdapat komponen pembentuk dan cara mengukur, yaitu :

1. Penilaian dilakukan setiap triwulan
2. Pengukuran dokumen yang terdiri dari jumlah pemberitaan netral dan positif
3. Pengukuran total pemberitaan sub sektor perikanan budi daya

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 86 (persen). Pada periode triwulan 1 indikator ini telah tercapai sebesar 100% dari target triwulan 1 sebesar 86%, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Hubungan Masyarakat dengan capaian pada triwulan 1 sebesar 4,68% dari anggaran sebesar Rp.3.767.434.000.

Tabel 14. Capaian Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Persentasi Dokumen Kerjasama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budi Daya							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian				
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-		86	86	100	116,28	116,28	-	86	116,28

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya
Indikator Kinerja	Persentasi Dokumen Kerjasama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budi Daya

Realisasi 2017-2023							2024				Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Target TW 1	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	-	-	100	86	86	100	116,28	86	116,28

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu:

1. Berkoordinasi dengan Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri terkait dengan pemberitaan netral dan positif di bidang perikanan budi daya.
2. Mengumpulkan pemberitaan harian sub sektor perikanan budi daya serta mengantisipasi kemunculan berita negatif dan persentase berita negatif.

Dapat disampaikan bahwa untuk mendukung indikator kegiatan tersebut selama periode triwulan 1 diperoleh sejumlah 30 berita sub sektor perikanan budi daya, dengan judul pemberitaan sub sektor perikanan budi daya dengan tone netral dan positif, sebagai berikut :

1. Lebih Besar dari Nikel, Potensi Hilirisasi Rumput Laut RI Tembus Rp 182 T, detik.com
2. Ikan Nila Sakti dari Sukabumi, deejeefish.com
3. KKP Siap Mengadopsi Teknologi Budi Daya Ikan Tuna Dari Turki, ANTARA
4. Wakatobi Upaya Wujudkan Hilirisasi Rumput Laut, Kendari Pos
5. KKP: Budi Daya Ikan Nila Di Karawang Merupakan Hasil Modifikasi, ANTARA
6. KKP: Nilai ekonomi tilapia di pasar global capai 13,9 miliar dolar AS, ANTARA
7. RI-Vietnam Kolaborasi Bangun Budi Daya Lobster di Dalam Negeri, CNBC
8. Trenggono Undang Investor Berinvestasi di Sektor Kelautan Perikanan, ANTARA
9. KKP Bangun Modeling Budidaya Nila Salin di Lahan tidak Produktif, Info Publik
10. KKP: Budi Daya Ikan Nila Di Karawang Merupakan Hasil Modifikasi, ANTARA
11. Potensi Cuan Puluhan Miliar dari Eks Tambak Udang Orde Baru di Karawang, detik.com
12. Indonesia dan Vietnam Kerja Sama Budi Daya Lobster, RRI.co.id
13. KKP Ubah Tambak Udang Jadi Modelling Klaster Budidaya Nila Salin di Karawang, detik.com
14. Potensi Cuan Puluhan Miliar dari Eks Tambak Udang Orde Baru di Karawang, detik.com
15. KKP: Budi daya ikan nila di Karawang merupakan hasil modifikasi, ANTARA
16. Pemerintah Mau Bangun Tambak Udang Modern di Sumba Timur Senilai Rp 7,5 T, detik finance

17. Telan Anggaran Rp7,5 Triliun, KKP Bangun Tambak Udang Modern di NTT, Bisnis
18. KKP Memodifikasi Tambak Udang Tak Berproduksi Jadi Tambak Nila Salin Di Karawang, ANTARA
19. KKP dan Pemkab Sumba Timur Bangun Modeling Budidaya Udang di Desa Palakahembi, Technology Indonesia.id
20. KKP Kembangkan Modeling Komoditas Unggulan untuk Dongkrak Produktivitas Perikanan Budidaya, Info Publik
21. KKP Kembangkan Kawasan untuk Udang, Rumput Laut, Nila, Kepiting dan Lobster, Niaga Asia
22. KKP Kembangkan Kawasan untuk Udang, Rumput Laut, Nila, Kepiting dan Lobster, Niaga Asia
23. Modeling Budidaya Rumput Laut di Wakatobi untuk Sejahterakan Pembudidaya, Tabloid Sinar Tani
24. KKP Bikin Modeling Budidaya Berkelanjutan 5 Komoditas, ANTARA
25. Panen Perdana Ikan Bandeng Bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pokdakan Sibali Resoe Bulukumba, Sulsel Pojok Satu
26. Investor Luar Negeri Tertarik : Kembangkan Sentra Budidaya Tuna di Papua, Trobos Aqua
27. Sertifikasi CPIB Tingkatkan Mutu Produk Perikanan Budidaya, NERACA
28. Budi Daya Ikan Bioflok Tumbuhkan Jiwa Kewirausahaan Santri di Bondowoso, Metro TV News
29. KKP Tumbuhkan Jiwa Kewirausahaan Santri lewat Budi Daya Ikan Bioflok, Info Publik
30. KKP Dorong Budidaya Ikan Sistem Bioflok di Pondok Pesantren, Indonesia Maritim News

Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya proaktif terhadap perkembangan isu-isu seputar sub sektor perikanan budi daya serta dapat produktif dalam menghasilkan *press release* dan mendistribusikan bahan-bahan publikasi mengenai sub sektor perikanan budi daya.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya adalah melakukan publikasi kegiatan DJPB yang positif dan netral dengan melakukan penyebaran melalui *press release*.

IKSK.14 Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ditjen PB dibandingkan dengan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024

Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK DJPB dibandingkan realisasi anggaran TA. 2024 adalah Nilai Temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK DJPB merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Batas tertinggi jumlah temuan atas Laporan Keuangan TA. 2024 (audit) tidak melebihi 1%.

Temuan audit adalah hasil evaluasi dari bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit. Temuan audit dapat mengindikasikan, baik kesesuaian ataupun ketidaksesuaian dengan kriteria audit atau peluang perbaikan. Pengertian ketidaksesuaian sendiri adalah penyimpangan melalui bukti obyektif atas kriteria audit yang ditetapkan auditor harus menginvestigasi untuk menentukan secara tepat kriteria audit yang dilanggar dan menetapkan rekomendasi tindakan perbaikan.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 100 (persen). Pada periode triwulan 1 ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Manajemen Keuangan dengan capaian pada triwulan 1 yakni sebesar 35,14% dari anggaran sebesar Rp.1.899.747.000.

Tabel 15. Capaian Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ditjen PB dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen PB Tahun 2024

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ditjen PB dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen PB Tahun 2024							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian				
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-		100					-	100	

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya										
Indikator Kinerja		Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ditjen PB dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen PB Tahun 2024										
		Realisasi 2017-2023					2024			Renstra 2020-2024		
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024	
-	-	-	-	-	100	100	100			100		

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu terutama terkait Sistem Pengendalian Internal (SPI) antara lain:

1. Penyelesaian seluruh rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2021 dilengkapi dengan bukti-bukti pendukungnya.
2. Penyelesaian saldo utang kepada pihak ketiga.
3. Penertiban penatausahaan persediaan, penyajian persediaan dalam neraca yang telah dilengkapi dengan inventarisasi oleh masing-masing satker lingkup Ditjen Perikanan Budidaya serta pencatatan persediaan dalam aplikasi.

Kendala yang dihadapi yaitu tanggapan yang diberikan oleh satker tidak sesuai dengan rekomendasi yang diberikan BPK.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu meningkatkan peran aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan probity audit dan review atas pengadaan barang dan jasa mulai dari perencanaan hingga pembayaran.

IKSK.15 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 80 (persen). Pada periode triwulan 1 indikator ini telah tercapai sebesar 100% dari target triwulan 1 sebesar 80%.

Tabel 16. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian		terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2024	terhadap target Tahun 2024			
-		80	80	100	120	120	-	80	120

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya							

Realisasi 2017-2023							2024				Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Target TW 1	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	74,32	70,41	67,21	89,86	89,15	80	80	100	120	80	120

Untuk mendukung pencapaian Indikator ini, ada beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 yaitu telah melakukan penyelesaian secara bertahap terhadap sisa temuan Itjen sehingga hasil yang didapat sudah melampaui target.

Kendala yang dihadapi yaitu :

1. Masih adanya beberapa temuan yang belum dapat diselesaikan,
2. Masih terdapat beberapa temuan yang sudah dalam proses penyelesaian akan tetapi terdapat kesalahan bukti dukung.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu :

1. Melakukan optimalisasi penyelesaian sisa temuan Itjen,
2. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder sehingga menghindari adanya kesalahan bukti dukung untuk penyelesaian temuan terkait.

IKSK.16 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen Perikanan Budi Daya

Penilaian IKPA berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang petunjuk teknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran, terdapat ketentuan umum bahwa penilaian IKPA terdiri dari 3 parameter yaitu

1. Kualitas implementasi perencanaan anggaran, dimana terdapat 2 penilaian parameter yaitu revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA.
2. Kualitas pelaksanaan anggaran, dimana terdapat 5 penilaian parameter yaitu penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dan dispensasi SPM.
3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran terdapat 1 penilaian parameter yaitu Capaian Output.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 93,76 (nilai). Pada periode triwulan 1 ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Manajemen Keuangan, Pengelolaan Keuangan Lingkup DJPB dan Pusat dengan capaian pada pada triwulan 1 yakni sebesar 77,28% dari anggaran sebesar Rp.739.753.000.

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya			
Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen Perikanan Budi Daya			
2023	2024	% Capaian	% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024

Realisasi		Target		Realisasi	Capaian				
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-		93,76					-	93,76	

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen Perikanan Budi Daya									
Realisasi 2017-2023							2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	95,11	89,07	91,51	86,50	93,76			93,76	

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu perlu perbaikan pada komposisi penilaian Deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran dan belanja kontraktual.

Permasalahan yang muncul yaitu kurangnya sdm yang memahami terhadap tata cara revisi halaman III DIPA.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu:

1. Melakukan revisi halaman III dipa,
2. Meningkatkan penyerapan anggaran sesuai target yang di halaman III dipa, dan
3. Memastikan pendaftaran kontraktual tidak melebihi 5 hari kerja sejak ditandatanganinya.

IKSK.17 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya

Tingkat kepatuhan merupakan pengukuran pelaksanaan suatu kegiatan, yang sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Perhitungan tingkat kepatuhan bisa dikontrol bila suatu pelaksanaan program telah sesuai dengan standart.

Dalam pasal 1 ayat (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D atau berasal dari perolehan lain yang sah.

Tingkat Kepatuhan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN unit Eselon I terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun metode perhitungannya dihitung berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Pemanfaatan BMN;
2. Pengamanan BMN dengan membuat Berita acara Peminjaman/ BA Pemakaian kepada masing-masing pegawai yang menggunakan BMN;
3. Mengusulkan Penghapusan atas BMN yang rusak berat kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penjualan atau pemusnahan;

4. Menyusun Rencana kebutuhan BMN lingkup satker sekretariat;
5. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
6. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
7. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu, akuntabel dan efisien;
8. Melakukan Verifikasi atas usulan BAST 526xxx pada satker pusat yang akan ditandatangani oleh KPB satker Pusat;
9. Melakukan monitoring dan pembinaan Laporan BMN di kepada seluruh anak satker Sekretariat DJPB (Dit. KKI, Dit. Produksi dan Usaha, Dit. Pakan dan Obat Ikan, Dit. Perbenihan);
10. Melakukan Stock opname fisik atas persediaan yang berada di Gudang penyimpanan;
11. Melakukan Pencatatan, monitoring dan mendistribusikan persediaan dan hasil Pengadaan alat pengolah data kepada pegawai Satker Sekretariat DJPB; dan
12. Membuat SOP terkait pengelolaan BMN.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 80 (persen). Pada periode triwulan 1 ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan BMN dengan capaian pada triwulan 1 yakni sebesar 36,67% dari anggaran sebesar Rp.556.000.000.

Tabel 18. Capaian Tingkat Kepatuhan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Setditjen PB

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Tingkat Kepatuhan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Setditjen PB							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi		Capaian			
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-		80					-	80	

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Tingkat Kepatuhan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Setditjen PB									
		Realisasi 2017-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	-	76,06	93	80			80	

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu telah dilaksanakannya Pengelolaan BMN seperti Penghapusan, Hibah, Pemakaian,

Inventarisasi, Dokumentasi, PSP, Penyusunan Laporan BMN dan Persediaan, Stock Opname persediaan.

Adapun permasalahan yang muncul sebagai berikut:

1. Masih terdapat BMN henti guna dan rusak berat yang masih tercatat di dalam laporan BMN yang belum dilakukan usulan penghapusan,
2. Masih terdapat satker yang belum mengusulkan penetapan status penggunaan (PSP) kepada sekretariat untuk selanjutnya mendapatkan Surat Keputusan dari pengguna Barang atau Pengelola Barang.
3. Terdapat BMN berupa kendaraan roda 2 yang masih harus dihapuskan atau diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang dimana kendaraan tersebut terletak dilokasi tersebut, dan
4. Melakukan inventarisasi/pencarian terhadap aset yang belum diketemukan.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya diantaranya yakni:

1. Melakukan pengamanan BMN dari aspek administrasi, pencatatan, dan hukum,
2. Mendorong usulan penetapan status penggunaan (PSP) BMN satker Sekretariat untuk ditetapkan PSP nya oleh Kementerian Keuangan,
3. Mendorong percepatan penghapusan BMN rusak berat pada satker Sekretariat DJPB,
4. Melakukan inventarisasi BMN,
5. Melakukan penyusunan dan penyampaian laporan BMN dan persediaan Audited TA 2023 secara tepat waktu,
6. Melakukan update data aplikasi Siman terhadap PSP yang sudah terbit SK,
7. Melakukan revisi RKBMN pada tahun anggaran berjalan lingkup Sekretariat, dan
8. Memproses usulan hibah BMN kepada Pengguna Barang/pengelola Barang.

IKSK.18 Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.

Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga.

Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 86 (nilai). Pada periode triwulan 1 ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk

indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi dengan capaian pada triwulan 1 yakni sebesar 8,07% dari anggaran sebesar Rp4.581.589.000.

Tabel 19. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian				
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-		86					-	86	

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya									
		Realisasi 2017-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	98,08	71,49	-	95,23	79,52	86			86	

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu:

1. Melakukan revisi halaman III dipa,
2. Meningkatkan penyerapan anggaran sesuai target yang di halaman III dipa,
3. Melakukan inputan capaian *output* pada aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan, dan
4. Melakukan *approval assessment* RO pada aplikasi SMART Kementerian Keuangan.

Kendala yang dihadapi yaitu perubahan revisi anggaran dampak dari pagu anggaran yang dibintang oleh Kementerian Keuangan.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu melakukan perubahan halaman iii dipa pasca perubahan revisi anggaran pada setiap bulannya.

IKSK.19 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya

Tingkat kepatuhan merupakan pengukuran pelaksanaan suatu kegiatan, yang sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Perhitungan tingkat kepatuhan bisa dikontrol bila suatu pelaksanaan program telah sesuai dengan standart.

Pengadaan barang dan jasa adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa.

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen PB merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa unit Eselon I terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 80 (persen). Pada periode triwulan 1 ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Umum dengan capaian pada triwulan 1 yakni sebesar 11,15% dari anggaran sebesar Rp.105.000.000.

Tabel 20. Capaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian				
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-		80					-	80	

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya									
Realisasi 2017-2023							2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	73,5	76,91	82,85	80			80	

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu telah dilakukan kegiatan rekonsiliasi pengisian SIRUP dan didapati masih ada Satker yang pengisian belum 100% dan Satker TP dinas kelautan provinsi belum melakukan pengisian RUP pada SIRUP.

Kendala yang dihadapi yaitu:

1. Aplikasi pemantuan dari LKPP sering terjadi kendala dan tidak *up to date*,
2. Teknis pencatatan belum seluruhnya dipahami oleh satker

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu :

1. Satker Eselon 1 melakukan pemantauan secara manual dan sedang dibuat aplikasi pemantauan oleh Biro umum dan PBJ,
2. Melakukan pembinaan ke Satker khususnya satker TP Dinas Provinsi, dan
3. Melakukan pengawasan dan menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap kegiatan pengadaan Barang/Jasa.

IKSK.20 Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen Perikanan Budi Daya

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.

Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 80 (persen). Pada periode triwulan 1 ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Umum dengan capaian pada triwulan 1 yakni sebesar 22,44% dari anggaran sebesar Rp.752.400.000.

Tabel 21. Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya										
Indikator Kinerja		Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen Perikanan Budi Daya										
2023		2024					% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024		Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi			Capaian					
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra	
-		80						-		80		
Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya										
Indikator Kinerja		Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen Perikanan Budi Daya										
Realisasi 2017-2023							2024			Renstra 2020-2024		
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024	
-	-	-	-	84,71	92,37	98,32	80			80		

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini yaitu melakukan koordinasi di lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya dalam hal pemenuhan data dukung dan melakukan pengawasan kearsipan secara rutin;

Kendala yang dihadapi yaitu adanya perubahan aplikasi yang memerlukan adaptasi dari aplikasi elayar menjadi aplikasi portal KKP.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu melakukan pra penilaian ketaatan Arsip.

IKSK.21 Persentase layanan perkantoran Setditjen Perikanan Budi Daya

Layanan Perkantoran adalah merupakan kegiatan layanan yang lebih bersifat pada pelayanan internal layanan jamuan rapat, layanan daya dan jasa, perawatan kendaraan dan layanan-layanan lainnya.

Selain pelayanan internal dalam kegiatan Layanan Perkantoran tersebut juga menyangkut layanan eksternal seperti jamuan bagi tamu, pemberian layanan bagi mitra kerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 80 (persen). Pada periode triwulan 1 ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Umum dengan capaian pada triwulan 1 yakni sebesar 19,80% dari anggaran sebesar Rp.844.010.000.

Tabel 22. Capaian Persentase Layanan Perkantoran Setditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Persentase layanan perkantoran Setditjen Perikanan Budi Daya							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian				
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-		80					-	80	

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Persentase layanan perkantoran Setditjen Perikanan Budi Daya									
		Realisasi 2017-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	-	100	100	80			80	

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu telah dilaksanakan kegiatan layanan perkantoran, layanan konsumsi rapat, layanan pimpinan serta layanan operasional Kendaraan Operasional dan Kendaraan Fungsional.

Kendala yang dihadapi yaitu proses penyusunan timeline dan rencana kegiatan rapat serta penggunaan kendaraan yang sering berubah.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu meningkatkan koordinasi dengan Sekretaris pimpinan serta pemanfaatan layanan konsumsi rapat serta penanggungjawab kendaraan.

IKSK.22 Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPB

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya.

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan kematangannya (maturitasnya) secara menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai tujuan, yaitu memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan unit kerja, Penilaian tingkat maturitas SPIP ini mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4/2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP.

Tabel 23. Capaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPB

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPB							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi		Capaian			
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-		3,3					-	3,3	

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPB									
		Realisasi 2017-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	-	-	-	3,3			3,3	

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu melakukan hasil tindak lanjut terhadap AOI (area of improvement) pada penilaian maturitas SPIP Tahun 2023 oleh BPKP.

Kendala yang dihadapi yaitu tingkat maturitas SPIP KKP pada tahun 2023 mencapai 3,6 atau terdefenisi , masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki sesuai dengan AOI.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu melakukan perbaikan sesuai AOI pada penilaian maturitas SPIP Tahun 2023 oleh BPKP.

IKSK.23 Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang Melaksanakan PEKPPP Mandiri

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat PEKPPP adalah upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks pelayanan publik.

Pelaksanaan PEKPPP Mandiri mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

PEKPPP Mandiri Instansional dilakukan terhadap seluruh ruang lingkup pelayanan publik, yaitu pelayanan barang, jasa dan/atau administratif yang ada di masing-masing Unit Organisasi Eselon I dan dilakukan terhadap seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan KKP.

PEKPPP Mandiri sangat penting dilakukan untuk mendukung capaian target kegiatan utama RB General KKP tahun 2024 yaitu pada sasaran “Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional” melalui kegiatan pelaksanaan pelayanan publik prima. Perubahan sasaran dan kegiatan reformasi birokrasi KKP tahun 2024 tersebut telah ditetapkan dengan Kepmen KP Nomor 166 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Kepmen KP Nomor 32 Tahun 2021 *road map* reformasi birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024.

Tahun 2023 Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya melakukan PEKPPP Mandiri pada 18 (delapan belas) Unit Pelayanan Publik dengan hasil nilai sebesar 4,60 (Pelayanan Prima). Hasil tersebut disampaikan oleh Kepala Pusdatin (Pusat Data, Statistik, dan Informasi) melalui Surat Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi KKP Nomor B.521/SJ.7/TU.140/II/2024 tanggal 1 Februari 2024 tentang Penyampaian Hasil PEKPPP Mandiri Instansional KKP Tahun 2023.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 75 (persen). Pada periode triwulan 1 ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal pada triwulan 1 belum ada capaiannya dari anggaran sebesar Rp.210.000.000.

Tabel 24. Capaian Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang Melaksanakan PEKPPP Mandiri

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang Melaksanakan PEKPPP Mandiri							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi		Capaian			
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1	terhadap target TW 1 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-		75					-	75	

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang Melaksanakan PEKPPP Mandiri									
Realisasi 2017-2023							2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	-	-	-	75			75	

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Indikator ini adalah:

1. Mengikuti rapat koordinasi pelaksanaan PEKPPP Mandiri Instansional lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 26 Maret 2024 di RR. Kaca Pusdatin, Lantai 16, GMB II KKP Gambir Jakarta Pusat sesuai dengan Undanguan Plh. Kapusdatin KKP Nomor B.1344/SJ.7/TU.330/III/2024 Tanggal 22 Maret 2024 Tentang Undanguan Rapat Koordinasi Pelaksanaan PEKPPP Mandiri Instansional; dan
2. Menyampaikan usulan anggota Tim PEKPPP Mandiri Instansional lingkup KKP melalui Nota Dinas Nomor 726/DJPB.1/KP.110/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 Tentang Usulan Nama Tim PEKPP Mandiri Instasional di Lingkungan KKP.

Sampai dengan triwulan I tahun 2024 belum ditemukan kendala dalam upaya pencapaian IKU ini.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya adalah melakukan koordinasi dengan Unit Pelayanan Publik (UPP) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya untuk malakukan PEKPPP Mandiri tahun 2024 dan *mengupload* dokumen data dukung maksimal tanggal 30 November 2024.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran APBN dilingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Triwulan 1 tahun 2024 adalah sebesar Rp.111.906.162.000 dan telah terealisasi Rp.20.532.996.666 atau sebesar 18,35% (sumber data aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan persentase realisasi belanja sebesar 0,76% dari capaian Triwulan 1 tahun 2023 sebesar 19,11%. Hal tersebut diakibatkan adanya blokir anggaran sejumlah Rp.4.304.400.000.

NO	KODE NAMA KEGIATAN	KETERANGAN	JENIS BELANJA										TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER		
1	2348 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	PAGU	47,324,621,000	61,631,541,000	2,950,000,000	0	0	0	0	0	0	0	111,906,162,000
		REALISASI	9,661,781,062 (20.42%)	10,529,865,604 (17.09%)	341,350,000 (11.57%)	0	0	0	0	0	0	0	20,532,996,666 (18.35%)
		SISA	37,662,839,938	51,101,675,396	2,608,650,000	0	0	0	0	0	0	91,373,165,334	
GRAND TOTAL		PAGU	47,324,621,000	61,631,541,000	2,950,000,000	0	0	0	0	0	0	111,906,162,000	
		REALISASI	9,661,781,062 (20.42%)	10,529,865,604 (17.09%)	341,350,000 (11.57%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	20,532,996,666 (18.35%)	
		SISA	37,662,839,938	51,101,675,396	2,608,650,000	0	0	0	0	0	0	91,373,165,334	

Gambar 10. Serapan Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024

NO	KODE NAMA KEGIATAN	KETERANGAN	JENIS BELANJA										TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER		
1	2348 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	PAGU	38,848,218,000	46,051,713,000	1,495,049,000	0	0	0	0	0	0	0	86,394,980,000
		REALISASI	6,878,149,837 (17.71%)	9,380,397,900 (20.37%)	249,210,000 (16.67%)	0	0	0	0	0	0	0	16,507,757,737 (19.11%)
		SISA	31,970,068,163	36,671,315,100	1,245,839,000	0	0	0	0	0	0	69,887,222,263	
GRAND TOTAL		PAGU	38,848,218,000	46,051,713,000	1,495,049,000	0	0	0	0	0	0	86,394,980,000	
		REALISASI	6,878,149,837 (17.71%)	9,380,397,900 (20.37%)	249,210,000 (16.67%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	16,507,757,737 (19.11%)	
		SISA	31,970,068,163	36,671,315,100	1,245,839,000	0	0	0	0	0	0	69,887,222,263	

Gambar 11. Serapan Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2023

BAB IV PENUTUP

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen PK Sesditjen Perikanan Budi Daya tahun 2024 bahwa Sesditjen Perikanan Budi Daya telah melaksanakan tugas, fungsi dan misinya berdasarkan uraian pencapaian kinerja dalam BAB III. Dari hasil analisis terhadap capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan 1 tahun 2024, beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain bahwa:

1. Alokasi anggaran APBN dilingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Triwulan 1 tahun 2024 adalah sebesar Rp.111.906.162.000 dan telah terealisasi Rp.20.532.996.666 atau sebesar 18,35% (sumber data aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan).
2. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan 1 tahun 2024 cukup baik yakni sebesar 119,07 (Nilai) (sumber data Aplikasi Kinerja KKP).

Beberapa rekomendasi atas ketercapaian target yang ditetapkan maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti pada tahun berikutnya adalah sebagaimana berikut:

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1	PM SAKIP Sekretariat DJPB	Peningkatan kualitas SDM yang melaksanakan dan mengimplementasikan SAKIP di lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya.
2	Indeks Profesionalitas ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun sasaran kerja pegawai Tahun 2024 dan melakukan evaluasi kinerja periode Triwulan I Tahun 2024, - Membuat monitoring perkembangan tugas belajar, dan - Membuat rekapitulasi kehadiran triwulan I.
3	Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya	Berkoordinasi dengan Biro SDM Aparatur dan Organisasi terkait perubahan nomenklatur jabatan fungsional Pengawas Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan dan proses administrasi dan penetapan kebutuhan jabatan fungsional bidang perikanan budidaya.
4	Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP	Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja yang telah diusulkan untuk mengikuti penilaian TPI/TPN tahun 2024 untuk <i>update</i> dokumen/data dukung pelaksanaan pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM dan menindaklanjuti temuan hasil evaluasi APIP (Itjen KKP/BPK RI) agar unit kerja yang telah diusulkan dapat memperoleh nilai yang optimal pada saat dinilai oleh Tim Penilai Internal (TPI) KKP.
5	Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ditjen PB dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen PB Tahun 2024	Meningkatkan peran aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan probity audit dan reviuw atas pengadaan barang dan jasa mulai dari perencanaan hingga pembayaran.
6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen Perikanan Budi Daya	Melakukan revisi halaman iii dipa dan meningkatkan penyerapan anggaran sesuai target yang di halaman iii dipa
7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengamanan BMN dari aspek administrasi, pencatatan, dan hukum,

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
	Setditjen Perikanan Budi Daya	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong usulan penetapan status penggunaan (PSP) BMN satker Sekretariat untuk ditetapkan PSP nya oleh Kementerian Keuangan, - Mendorong percepatan penghapusan BMN rusak berat pada satker Sekretariat DJPB, - Melakukan update data aplikasi Siman terhadap PSP yang sudah terbit SK, - Melakukan revisi RKBMN pada tahun anggaran berjalan lingkup Sekretariat, - Melakukan inventarisasi BMN, dan - Memproses usulan hibah BMN kepada Pengguna Barang/pengelola Barang.
8	Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang Melaksanakan PEKPPP Mandiri	Melakukan koordinasi dengan Unit Pelayanan Publik (UPP) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya untuk malakukan PEKPPP Mandiri tahun 2024 dan <i>mengupload</i> dokumen data dukung maksimal tanggal 30 November 2024.

LAMPIRAN

Dokumentasi Keterlibatan Pimpinan



1. Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya



2. Rapat Koordinasi Evaluasi DAK 2023, Rencana Pelaksanaan DAK 2024 dan Sosialisasi Pendataan Perikanan Budi Daya Tahun 2024



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041**